

Perilaku PDAM Sleman yang mengeksploitasi sumber mata air Umbul Wadon untuk berbagai keperluan termasuk dijual kepada perusahaan air minum telah menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak mengalami gagal panen dan sulit untuk ditanami lagi. Ironis, pada saat masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan air minum dan pertanian pemerintah justru menjual air kepada pihak swasta demi kepentingan komersial. Konflik Umbul Wadon memperlihatkan bahwa masyarakat telah melakukan perlawanan atas ketidakadilan dari kebijakan pemerintah.

Buku ini mengkaji dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas sumber daya air. Mulai dari proses gerakan pada tahun 1998 sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan dibuatnya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tahun 2000, proses monitoring masyarakat dari tahun 2000-2003 hingga diketahui adanya kecurangan dari PDAM Sleman, kemudian dilakukan gerakan kedua dengan model gerakan yang berbeda. Selengkapnya dapat dibaca di dalam buku ini.



Astri Hanjarwati

MENOLAK PRIVATISASI AIR



Astri Hanjarwati

MENOLAK PRIVATISASI AIR

Aksi Kolektif Masyarakat di Umbul Wadon dalam Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air



Menolak
Privatisasi
AIR

**Aksi Kolektif Masyarakat di Umbul Wadon dalam
Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Astri Hanjarwati

Menolak
Privatisasi
AIR

**Aksi Kolektif Masyarakat di Umbul Wadon dalam
Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air**



MENOLAK PRIVATISASI AIR

Aksi Kolektif Masyarakat di Umbul Wadon dalam Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air

©Astri Hanjarwati

x + 116 hlm ; 15,5 x 23 cm.

ISBN : 978-623-261-123-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2020

Penulis : Astri Hanjarwati
Editor : Alvian A.
Desain Sampul : M. Hakim
Layout : M. Hakim

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

Kupersembahkan karya ini untuk Suami Tercinta
dan Ketiga Buah Hatiku :
Kayyis Fathul Ihsan
Kahisha Zafira Azzahra
Khaira Shezan Almahira

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang semula adalah tesis penulis di Program Pasca Sarjana Sosiologi Konsentrasi Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial UGM. Walaupun penuh halangan, rintangan dan waktu yang terbatas, tetapi akhirnya karya ini selesai dan kini hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Tesis penulis yang semula dengan judul “Dinamika Gerakan Masyarakat Sekitar Umbul Wadon (Studi Atas Gerakan Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air) kemudian disunting menjadi buku dengan judul *Menolak Privatisasi Air: Gerakan Masyarakat di Umbul Wadon dalam Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air*.

Lewat kata Pengantar Penulis ini, tidak lupa penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan buku ini. Kepada Drs. Djoko Suseno, SU selaku dosen pembimbing penyusunan tesis yang akhirnya dapat dibukukan ini. Kepada Prof.Dr. Susetiawan, Drs. Suparjan, M.Si, dan

Drs. Silverius Djuni Prihatin, masing-masing selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun bagi penulis.

Ucapan terima kasih kepada seluruh Staf Program Pasca Sarjana Sosiologi Konsentrasi Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial. Terima kasih kepada *Tokyo Foundation* atas biaya pendidikan dan penelitian tesis yang akhirnya dapat diterbitkan ini. Juga diucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Internasional UGM yang telah menjembatani antara penulis dengan *Nippon Foundation*.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Pak Bambang dan Pak Hari selaku pemimpin dan tokoh dari Komite Rakyat Lereng Merapi, Pemerintah Desa Umbulharjo, dan seluruh masyarakat, PDAM Sleman, PD Argajasa/Anindya, LSM Wana Mandhira.

Kepada yang telah banyak membantu proses penelitian buku ini, Teo, Bowo, dan Dek Upik serta teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis diucapkan banyak terima kasih.

Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi seluruh pembaca, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi tentang gerakan sosial. Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali ketidaksempurnaan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Astri Hanjarwati

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konflik Privatisasi Sumber Daya Air	1
B. Urgensi Penulisan Buku Ini.....	8
C. Cara Penyajian Buku Ini	9
BAB II PARADIGMA AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT..	21
A. Gerakan Sosial	21
B. Dinamika Kelompok Masyarakat.....	28
C. Teori Perilaku Kolektif (<i>Collective of Behaviour</i>).....	33
D. Gerakan Sosial di Umbul Wadon Perspektif Neil J. Smelser dan Charles Tilly	49
BAB III UMBUL WADON: SUMBER DAYA, DEMOGRAFI, DAN SISTEM SOSIAL	53
A. Sumber Mata Air Umbul Wadon.....	53
B. Demografi	56
C. Perekonomian Lokal.....	62

D. Nilai Budaya dan Adat Istiadat	67
E. Kelembagaan dalam Masyarakat	68
F. Struktur dan Stratifikasi Sosial	68
BAB IV AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT UMBUL	
WADON: DARI KRITIK HINGGA NEGOSIASI.....	71
A. Pengantar	71
B. Awal Mula Pemerintah Memanfaatkan Mata Air Umbul Wadon.....	72
C. Proses Terjadinya Aksi Kolektif tahun 1998-2000.....	76
D. Gerakan Masyarakat Tahun 2003-2004.....	86
BAB V ADVOKASI MASYARAKAT VS PEMERINTAH....	91
A. Pengantar.....	91
B. Negosiasi dan Advokasi Tahun 1998.....	92
C. Negosiasi dan Advokasi Tahun 2003-2004	100
BAB VI PENUTUP.....	105
DAFTAR PUSTAKA	109
TENTANG PENULIS.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konflik Privatisasi Sumber Daya Air

Air merupakan sumber daya yang tidak tergantikan. Dewasa ini, kebutuhan akan air semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Ironis pada saat masyarakat banyak yang membutuhkan air, jumlah air yang tersedia semakin berkurang. Berkurangnya ketersediaan air ini dikarenakan rusaknya ekosistem alam yang merupakan akibat dari perubahan paradigma pembangunan yang diterapkan pada masa Orde Baru, yaitu pembangunan yang tidak terkendali dan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara cepat.

Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense*), deteriorasi (memburuk atau rusak) ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi (Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002*). Asumsi yang ada adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya baru kemudian dilakukan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara merata. Namun, kenyataannya tidak terjadi pemerataan yang merata,

justru menciptakan kesenjangan. Kebijakan–kebijakan pembangunan diterapkan dengan sistem *top down* sehingga mengesampingkan partisipasi masyarakat.

Propinsi DI.Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman, tidak luput dari dampak negatif kebijakan pembangunan. Kerusakan ekosistem yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya di lereng Merapi mengakibatkan matinya sumber air bagi masyarakat. Keringnya mata air disebabkan karena berkurangnya luas daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi permukiman penduduk dan industri pariwisata. Pengurangan daerah resapan air di Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, Ngaglik dan Cangkringan dapat dilihat pada data dari BPS DI.Yogyakarta berikut:

Tabel.1. Data Alih Fungsi Lahan

Tahun	Daerah Resapan Air	Daerah Permukiman
2000	10.472 hektar	7.760 hektar
2004	10.360 hektar	7.781 hektar

Sumber: BPS DIY tahun 2004

Pada saat ini, yang tersisa hanya dua mata air, yaitu mata air Bebung dan mata air Umbul Wadon, di mana debit air paling besar adalah mata air Umbul Wadon, yaitu sebesar 355-400 liter per detik pada musim kemarau dan 600 liter per detik pada musim hujan (http://www.forplid.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1, download 13 juli 2008. 05.57). Mata air ini menjadi tumpuan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya, yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga, beternak sapi perah, dan irigasi pertanian. Padahal, menurut catatan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 1979, di Kabupaten Sleman terdapat 102 mata air. Rata-rata ada dua atau tiga mata air di setiap desa (http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?row=4&tp=artikel&ktg=airminimum&kd_link=&kode=62, download tanggal, 13 juli 2008. 06.03).

Mata air Umbul Wadon terletak di Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Air dari Umbul Wadon ini memenuhi kebutuhan air belasan desa di Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Ngaglik dan Turi yang mengalir melalui sungai. Pada tahun 1992, mata air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari selain untuk irigasi dengan mengandalkan tenaga gravitasi. Jaringan ini dibuat atas swadaya dari masyarakat. Keberhasilan masyarakat merangsang proyek serupa, yaitu proyek propinsi P2KT (Proyek Pengelolaan Air Tanah) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat desa Umbul harjo. Harapan masyarakat air dapat dialirkan dengan debit air 4 liter/detik, namun pada kenyataannya hanya 2,5 liter/detik, sehingga proyek ini gagal dan tidak digunakan oleh masyarakat.

Pada tahun 1997, PDAM Sleman mulai membangun proyek, yaitu dengan memasang pipa-pipa saluran air. Proyek ini tidak dikomunikasikan kepada masyarakat dan baru diketahui oleh masyarakat bahwa proyek ini milik PDAM Sleman setelah pembangunan hampir selesai. Selain PDAM Sleman, Umbul Wadon juga dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Marta, dan PD. Anindya. Kondisi ini membuat masyarakat khawatir akan adanya *privatisasi air* yang berakibat pada berkurangnya suplai air untuk kebutuhan masyarakat.

Pada saat itu, ribuan masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, menolak dan berdemo di kantor Bupati Sleman sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman. Massa bahkan sudah sempat melakukan pembongkaran pipa-pipa berdiameter $\frac{3}{4}$ meter tersebut. Aksi ini selain dilakukan oleh masyarakat juga didukung oleh LSM Komunitas Lereng Merapi. Sampai akhirnya, konflik tersebut bisa diredam melalui negosiasi yang diakomodir dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal tersebut mengatur mengenai pembagian air, yaitu

50 persen untuk irigasi pertanian, 35 persen untuk air minum (dibagi untuk PDAM Sleman, PDAM Tirta Marta, dan PD. Anindya), serta 15 persen untuk konservasi. Amdal ini diberlakukan mulai tahun 2000.

Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya menjadi suatu proses pengelolaan konflik. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu terdiri dari individu dan kelompok yang mempunyai nilai-nilai, kepentingan, keinginan, harapan, dan prioritas yang berbeda sehingga selalu ada ketegangan dari karakter yang berbeda atau bahkan terdapat ketidakcocokan di antara karakter-karakter tersebut (Mitchell, Bruce, B.Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, hal. 19-20). Demikian yang terjadi di Umbul Wadon dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan rakyat, maka muncullah konflik dalam pengelolaan sumber daya air.

Sejak saat itu sampai dengan pertengahan tahun 2003, intensitas konflik menurun, walaupun bersifat laten. Meski demikian, dalam interval waktu tersebut sebagian masyarakat sudah menengarai adanya kecurangan air, yang dibuktikan dari aliran untuk irigasi yang semakin mengecil. Akan tetapi, masyarakat belum mempunyai kapasitas untuk menyelesaikannya atau berkonsolidasi untuk bertindak.

Melalui rangkaian diskusi terbatas para aktivis dan masyarakat, kecurangan tersebut dimunculkan melalui media massa pada Oktober 2003. Sejak saat itu, isu mengenai konflik Umbul Wadon mulai meningkat lagi. Selain dipicu oleh publikasi, konflik meningkat karena aliran air irigasi masyarakat yang sebelumnya juga disuplai dari Umbul Lanang, mulai September 2003 terhenti, karena Umbul Lanang mulai tidak mengeluarkan air. Praktis irigasi hanya bergantung dari Umbul Wadon yang sudah dieksploitasi untuk berbagai macam keperluan.

Konflik mencuat karena PDAM Sleman tidak mematuhi aturan pembagian air sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam Amdal. Seperti disebut di atas, jatah 35 persen untuk air minum dibagi untuk tiga perusahaan, yaitu PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, dan PD. Anindya, yaitu perusahaan daerah milik Provinsi DIY yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kaliurang, yang salah satunya menyediakan layanan air bersih. Namun kenyataannya, dari hasil pengukuran yang dilakukan pada Oktober, Desember 2003 dan April 2004, PDAM Sleman telah mengambil jatah air yang berlebihan, dari yang diijinkan sekitar 80 liter/detik menjadi sekitar 190 liter/detik atau hampir 150 persen lebih banyak dari yang diijinkan (Mitchell, Bruce, B.Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *ibid.*).

Dari permasalahan itulah kemudian muncul ketidakpuasan masyarakat hulu. Perilaku PDAM Sleman yang mengambil air secara berlebihan tersebut telah menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, mengalami gagal panen dan sulit untuk ditanami lagi. Kecurangan PDAM secara terbuka disampaikan melalui advokasi di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*) (Fakih, Mansour, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist Press, 2007, hal. Viii).

Tahun 2004 masyarakat melakukan protes kembali akan adanya kecurangan yang dilakukan PDAM Sleman dan PD Anindya yaitu kedua perusahaan air minum tersebut memasang pipa *by pass*, yaitu pipa yang dipasang tidak pada alat pengukur. Selain itu, protes masyarakat juga dipicu oleh peresmian perusahaan air minum EVITA oleh Gubernur DIY, dan diam-diam PDAM Sleman juga menjual air kepada EVITA. Ironis pada saat masyarakat kekurangan

air untuk kebutuhan air minum dan pertanian pemerintah justru menjual air kepada pihak swasta demi kepentingan komersial. Protes ini berbuah ditinjau ulang AMDAL tahun 2000, dan disepakati AMDAL jilid dua tahun 2004.

Kebijakan negara yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat setempat dan cenderung memihak suatu kelompok masyarakat seringkali mendapat tanggapan dari masyarakat melalui cara-cara yang berlaku dan dianggap dapat menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Hal ini dikatakan oleh Suyanto (1990) sebagai berikut:

Pengalaman di berbagai negara sudah membuktikan, bahwa tekanan yang berlebihan terhadap dinamika masyarakat justru menimbulkan keguncangan terhadap kemampuan negara dan berkurangnya legitimasi negara di mata rakyat. Negara yang dinilai rakyat terlalu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan justru merupakan bomerang. Berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat umumnya sangat beragam dalam melakukan perlawanan misalnya dengan cara mengadu ke DPR, mengirim surat ke Komisi Nasional HAM, mogok makan, melakukan aksi unjuk rasa, menggelar parlemen jalanan hingga bentuk aksi kekerasan dan perusakan (Agustina, Fitria, N.Kusuma, *Gelombang Perlawanan Rakyat (Kasus-kasus Serakan Sosial di Indonesia)*, Yogyakarta: Insist Press, 2004, hal. 165).

Konflik Umbul Wadon juga memperlihatkan bahwa rakyat telah melakukan perlawanan atas ketidakadilan dari kebijakan pemerintah. Menurut Charles O. Jones bahwa masalah yang menyangkut pada kebijakan publik ada dua tipe, yaitu: *pertama* masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga yang terorganisasi untuk melakukan tindakan (*action*). *Kedua*, masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan secara individual/pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik),

tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan (Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 2002, hal. 14). Masalah Umbul Wadon termasuk dalam kategori pertama karena masyarakat secara terorganisir melakukan aksi kolektif untuk mengubah kebijakan publik sehingga menjadi pro rakyat.

Fenomena di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Fokus kajian yang dipilih oleh penulis adalah mengenai dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas sumber daya air. Kurun waktu 1997-2004 terjadi sebuah dinamika gerakan masyarakat dalam mencapai hak – hak rakyat atas sumber daya air Umbul Wadon, yaitu pada tahun 1998 masyarakat melakukan aksi besar-besaran dengan mendatangi kantor Bupati Sleman dan akhirnya disepakati AMDAL.

Pada periode ini masyarakat melakukan gerakan bersama dengan Komunitas Masyarakat Lereng Merapi (KRLM) di mana anggotanya sebagian adalah penduduk asli desa Umbulharjo. Tahun 2000 AMDAL dilanggar oleh PDAM Sleman dan PD.Anindya , kemudian masyarakat kembali melakukan protes. Berbeda dengan protes pada tahun 1998, protes yang kedua ini dilakukan melalui media massa. Aktor dari gerakan periode ini adalah masyarakat yang dibantu oleh LSM Wana Mandhira dalam advokasinya.

Penelitian dengan objek konflik perebutan air Umbul Wadon juga pernah dilakukan oleh Anton Sujarwo tahun 2001 dengan judul penelitiannya, “Konflik dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air (Studi Kasus dalam pemanfaatan Sumber Air Umbul Wadon di Desa Umbulharjo Kabupaten Sleman)” dan yang kedua dilakukan oleh Istiningrum tahun 2006 dengan judul penelitiannya, “Kemitraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Kearifan dan Eksploitasi (Studi Tentang Pengelolaan Sumber Air Umbul Wadon).”

Sedangkan yang dilakukan penulis berbeda dengan kedua penelitian yang telah dilakukan tersebut. Dalam penelitian tesis, fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Dinamika Gerakan Masyarakat Sekitar Umbul Wadon (Studi atas Gerakan Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak Atas Sumber Daya Air).” Yaitu, untuk mengetahui proses gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon pada tahun 1998 sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan dibuatnya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tahun 2000, proses monitoring masyarakat dari tahun 2000-2003, sehingga diketahui adanya kecurangan dari PDAM Sleman, kemudian dilakukan gerakan kedua dengan model gerakan yang berbeda. Fenomena inilah yang menarik bagi penulis untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam.

B. Urgensi Penulisan Buku Ini

Penelitian untuk keperluan penulisan buku ini bertujuan untuk mengetahui dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas sumber daya air dalam rentan waktu 1998-2004 sehingga disusun AMDAL jilid I dan II, (proses penggabungan diri, proses komunikasi, negosiasi, ancaman yang diperoleh, hambatan dan tantangan dalam melakukan aksi kolektif, dan proses komunikasi dan advokasi atas kebijakan pemerintah sehingga berhasil dalam penyusunan AMDAL).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi kepada para mahasiswa maupun masyarakat yang tertarik pada studi mengenai gerakan sosial yang terkait dengan aksi kolektif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya demi mencapai kehidupan yang sejahtera sehingga akan memotivasi untuk dilakukan studi yang lebih mendalam di kemudian hari.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melihat reaksi dan perjuangan dari masyarakat dalam memperjuangkan

hak-haknya atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat kebijakan bahwa diperlukan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait sehingga mampu tercipta kesinambungan dan kesejahteraan rakyat.

C. Cara Penyajian Buku Ini

Penulis melakukan kegiatan penelitian untuk keperluan penulisan buku ini dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J Moleong, *Metodologi Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai sebuah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.

Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipegaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif. Penggunaan metode penelitian yang dilakukan penulis didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan beberapa kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.

Metode atau strategi yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) adalah penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*; peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki; dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, Robert K, Prof, Dr. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

Subjek penelitian bisa saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Penggunaan strategi studi kasus karena penulis ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Pemilihan strategi ini karena fenomena yang penulis teliti memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda dengan fenomena atau permasalahan daerah lainnya.

Lokasi penelitian terletak di Dusun Pangkrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini merupakan lokasi di mana mata air Umbul Wadon berada. Masyarakat Desa Umbul Harjo menggantungkan pemenuhan kebutuhan air dari Umbul Wadon yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, mandi, cuci dan beternak sapi perah yang merupakan mata pencaharian penduduk di Desa Umbulharjo.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktor gerakan sosial (Komunitas Rakyat Lereng Merapi), Masyarakat Desa Umbulharjo, Pemerintah Desa, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma (PDAM Sleman), Perusahaan Daerah Argajasa/ Anindya, Lembaga Swadaya Masyarakat Wana Mandhira.

Pengambilan informan dilakukan secara purposif. Yaitu, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Pada umumnya, informan berjumlah kecil tetapi sebanyak mungkin menjangkau informasi untuk tujuan penelitian dan tetap dalam batasan masalah penelitian, maka jumlah informan yang diambil tidak ditentukan batasnya. Dalam penelitian ini informan yang diambil berjumlah 10 orang meliputi: *pertama*, tiga orang aktor gerakan sosial dari Komunitas Rakyat Lereng Merapi dan tokoh masyarakat Umbul Harjo yang terdiri dari Y Bambang Sugeng, S Eddy Harryanto, dan Basuki.

Tabel .II.1. Karakteristik Responden dari Kalangan Aktor Gerakan Sosial

NO	NAMA	KARAKTERISTIK UTAMA
1	Y Bambang Sugeng	Pemimpin Gerakan
2	S Eddy Haryanto	Pemimpin Gerakan
3	Basuki	Tokoh Masyarakat

Alasan dipilihnya para responden atau subjek penelitian ini adalah karena orang-orang itu sangat memahami sejarah dilakukannya gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon dalam memperjuangkan hak atas air Umbul Wadon. Di samping itu juga mereka mempunyai peran penting dalam gerakan sosial Umbul Wadon, yakni sebagai inisiator, organisator, mobilisator, motivator, negosiator. Dalam proses gerakan sosial, mereka inilah yang bertindak langsung atas nama Komunitas Rakyat Lereng Merapi dan masyarakat Desa Umbulharjo.

Kedua, satu orang dari pemerintah desa yaitu Bapak Bejo Mulyono. Alasan dipilihnya responden dari pemerintah desa untuk mengetahui proses komunikasi dan mediasi antara rakyat dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Air Minum.

Ketiga, tiga orang dari masyarakat Desa Umbulharjo. Alasan dipilihnya responden dari warga masyarakat secara acak adalah

untuk melakukan *cek* dan *recheck* apakah gerakan masyarakat diikuti oleh semua masyarakat. Responden dari masyarakat adalah Ika, Pak Sobar, dan Pak Subagyo Hadi.

Keempat, satu orang dari Perusahaan Daerah Air Minum Sleman. Alasan dipilihnya responden dari PDAM Sleman untuk mengetahui proses komunikasi dan mediasi antara rakyat dengan Perusahaan Air Minum. Responden dari PDAM Tirta Dharma, yaitu Pak Edi.

Kelima, satu orang dari PD.Argajasa. Alasan dipilihnya responden dari PDAM Sleman untuk mengetahui proses komunikasi dan mediasi antara rakyat dengan Perusahaan Air Minum. Respondennya adalah Direktur PD. Argajasa, yaitu Pak Yulianto Subagyo.

Keenam, satu orang dari LSM Wana Mandhira. Alasan dipilihnya responden dari LSM Wana Mandhira adalah untuk mengetahui proses pendampingan dan pendidikan masyarakat. Respondennya adalah Ketua LSM Wana Mandhira, yaitu Mas Angga.

Adapun tahap-tahap penelitian untuk buku ini meliputi, *pertama*: perencanaan. Pemilihan objek penelitian, yaitu masalah konflik air Umbul Wadon, didasari pada ketertarikan penulis mengenai masalah gerakan sosial. Pada saat itu, penulis mencari objek penelitian dengan cara membaca surat kabar, *browsing* di internet, dan membaca buku yang pada akhirnya menemukan kasus konflik air Umbul Wadon. Setelah itu, penulis mencari referensi sebanyak-banyaknya mengenai konflik air Umbul Wadon untuk memahami peristiwa dan mencari fokus untuk dikaji lebih lanjut. Pada saat ini, penulis mengetahui bahwa LSM Wana Mandhira menjadi LSM pendamping dalam proses gerakan Masyarakat. Proses ini telah mulai penulis laksanakan dari bulan juli 2008.

Penulis mulai menemui ketua LSM Wana Mandhira untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Pada awal penelitian, LSM Wana Mandhira menjadi petunjuk awal bagi penulis untuk mengkaji masalah gerakan masyarakat Umbularjo. Proses ini juga dipergunakan penulis untuk mencari referensi terhadap para informan dan kejelasan gerakan sosial masyarakat Umbul Wadon. Mas Angga memberikan daftar nama orang-orang yang bisa penulis hubungi untuk mengetahui mengenai masalah gerakan masyarakat. Setelah berdiskusi dengan Mas Angga, penulis mulai mencari dan berkenalan dengan informan untuk melakukan pendekatan dalam memperoleh informasi. Waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan perkenalan dan perizinan hingga bisa melakukan diskusi dengan informan kurang lebih tiga Minggu.

Kedua, pengambilan data. Dalam teknik pengambilan data harus diperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada metode penelitian yang digunakan. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan kualitas dan pertimbangan praktis.

Data yang diperoleh penulis berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung oleh penulis saat melakukan penelitian. Data ini merupakan hasil wawancara dari sejumlah informan maupun responden yang terlibat dengan objek yang dikaji.

Selain itu, data primer diperoleh berdasarkan hasil observasi atau pengamatan penulis. Sedangkan data sekunder merupakan data-data pendukung, yaitu dokumen-dokumen penting yang berasal dari aktor yang terlibat, surat kabar, buku, jurnal, maupun hasil kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

Pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data, mencatat segala informasi serta hal-hal yang relevan dengan

masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamat sebagai pemeranserta, yaitu peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum bahkan mungkin mendapatkan dukungan oleh subjek (Moleong, 2005: 177). Karena itu, segala macam informasi termasuk rahasia sekalipun dapat dengan mudah diperolehnya. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap situasi dan kondisi masyarakat, sasaran, serta *stakeholder* yang memiliki korelasi dengan kajian penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengamatan terhadap objek penelitian penulis lakukan setiap kali penulis melakukan kunjungan dan wawancara. Pengamatan pertama yang penulis lakukan adalah dengan mengelilingi seluruh wilayah Desa Umbulharjo untuk mengetahui struktur wilayah, adat/kebiasaan masyarakat Umbulharjo aktivitas yang dilakukan masyarakat, dan mengetahui pekerjaan masyarakat. Beruntung penulis mempunyai teman yang merupakan warga Desa Umbulharjo, yang mempunyai peran sebagai penunjuk jalan dan membantu memperkenalkan diri penulis kepada semua responden dan perangkat desa. Pengamatan berlangsung selama penulis melakukan penelitian.

Adapun proses wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Menurut Lincoln dan Guba, maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang diharapkan untuk dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong, 2002: 135).

Selama wawancara dilakukan pencatatan data yang akan dijadikan dasar analisis. Dalam pencatatan data ini dilakukan melalui pencatatan sendiri. Dalam teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam menggunakan informan untuk mengungkap informasi dan fakta yang sebenarnya di balik fenomena yang ada. Informasi dari berbagai informan tersebut dianalisis yang kemudian dicari benang merahnya.

Berdasarkan sampling dan satuan kajian di atas, wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan berdasarkan satuan kajian yang telah ditentukan. Mas Angga, ketua LSM Wana Mandhira, sebagai responden pertama dan petunjuk bagi penulis untuk mencari responden yang lain. Wawancara dengan Mas Angga dilakukan sebanyak tiga kali setelah penulis merasa bahwa informasi yang diinginkan penulis sudah diperoleh.

Responden kedua yang diwawancarai adalah Pak Bambang yang merupakan warga Umbulharjo dan pemimpin dari Komunitas Rakyat Lereng Merapi. Dari Pak Bambang selain penulis memperoleh informasi mengenai gerakan masyarakat, penulis juga menemukan responden lain yang ditunjukkan oleh Pak Bambang. Penulis melakukan wawancara dengan Pak Bambang sebanyak dua kali.

Responden selanjutnya adalah Pak Edy yang merupakan anggota Komunitas Rakyat Lereng Merapi. Pak Edy merupakan responden yang mempunyai semua dokumen, baik foto dan tulisan-tulisan pada saat gerakan masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan Pak Edy sebanyak empat kali.

Responden selanjutnya Pak Basuki yang merupakan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam aksi masyarakat. Penulis melakukan

wawancara dengan Pak Basuki sebanyak 2 kali. Ketiga responden, yaitu Pak Bambang, Pak Edy, dan Pak Basuki memaparkan dengan transparan mengenai gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon.

Wawancara dengan Pak Bejo Mulyono dilakukan di pertengahan waktu penelitian. Wawancara dengan Pak Bejo dilakukan sebanyak dua kali. Pada awal wawancara Pak Bejo terlihat sangat hati-hati dan penulis tangkap “agak takut” menjawab semua pertanyaan penulis. Pada awal, wawancara informasi yang diinginkan penulis tidak terjawab. Akhirnya, penulis mencoba membuat janji untuk wawancara kedua. Beruntung Pak Bejo bersedia diwawancarai lagi. Pada wawancara kedua penulis berusaha meyakinkan Pak Bejo bahwa ini untuk kepentingan akademis, maka beliau lebih rileks dan menjawab semua pertanyaan dengan baik.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada PDAM Sleman, yaitu Pak Edi dan PD. Anindya/Argajasa, yaitu Pak Yulianto Subagyo. Wawancara dengan kedua responden ini dilakukan sebanyak masing-masing satu kali. Penulis bersyukur untuk melakukan wawancara pada kedua responden ini tidak mengalami kesulitan.

Setelah semua responden selesai diwawancarai, penulis melakukan wawancara secara acak kepada masyarakat. Yang pertama Pak Sobar, penulis temui di balai desa Umbulharjo ketika penulis menunggu kedatangan Pak Bejo. Pak Subagyo Adi adalah ketua Karang Taruna, penulis melakukan wawancara di rumahnya.

Sedangkan Ika adalah warga masyarakat yang penulis wawancarai ketika penulis mewawancarai Pak Subgyo Adi dan akhirnya penulis mewawancarai Ika pada hari yang telah disepakati. Responden dari masyarakat berperan untuk melakukan *chek* dan *re-chek* atas data yang telah penulis peroleh, yaitu apakah semua masyarakat mengetahui tentang gerakan masyarakat yang dilakukan dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam gerakan tersebut.

Selain wawancara, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen sebagai data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar. Penggunaan dokumen meliputi sumber tertulis dari literatur, dengan pengambilan foto-foto dokumen pada saat aksi gerakan sosial dan dokumen – dokumen tulisan yang berkaitan dengan gerakan sosial.

Setelah tahap pengambilan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan pola satuan dasar. Kemudian memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi hubungan (Moleong, 1992).

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah atau dianalisis untuk mendapatkan informasi. Sebelum diolah, data yang terkumpul diseleksi terlebih dahulu atas dasar reliabilitas. Data yang rendah reliabilitasnya digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Data yang telah lulus dalam seleksi dioalah atau dianalisis sehingga merupakan informasi yang siap untuk dievaluasi dan diinterpretasikan.

Sebagian besar data-data kualitatif terdiri dari kata-kata, maka analisis data dimulai sejak awal ketika memperoleh data di lapangan. Analisis data dikerjakan sejak awal turun lapangan sampai selesai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, sebagaimana menurut Nasution, yakni reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Salim, Agus, Drs, MS, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2006).

Reduksi data menurut Miles dan Huberman, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, dan diberi susunan yang sistematis sehingga mudah dikendalikan.

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun verifikasi, yaitu kegiatan konfigurasi yang utuh. Dari data yang dikumpulkan sejak awal yang sudah dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dalam penelitian, dan sebagainya. Kemudian diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan mencari data baru yang mendukung agar menjamin validitas.

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat diperhatikan berkaitan dengan kesahihan (*validitas*), baik internal maupun eksternal dan keterandalan (*reliabilitas*). Untuk menilai kesahihan internal hasil penelitian dapat digunakan teknik pemeriksaan data. Dalam pemeriksaan data digunakan empat macam kriteria, yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data ini, penulis menggunakan tiga cara, yaitu: *pertama*, ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, ketekunan pengamatan menyediakan *kedalaman*. Di mana penulis mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu, teknik ini menuntut penulis agar mampu menguraikan secara rinci bagaimana menemukan proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan (Moeloeng, 1992).

Kedua, triangulasi. Teknik triangulasi disebut juga teknik *check* dan *re-check*. Dalam penelitian sosial yang sifatnya terbuka, hasil penelitian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Sehingga perlu waspada dan perlu dicek dengan metode kualitatif (Patton 1987, dalam Moleong, 2000). Hal ini dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi (Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dan apa yang dikatakan sepanjang waktu), 4) membandingkan keadaan dan perspektif berbagai pendapat dan pandangan informan, 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi yang peneliti lakukan adalah dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan aktor gerakan sosial, pemerintah daerah, PDAM dan perusahaan air minum, pemerintah Desa Umbulharjo dan masyarakat Umbulharjo secara acak serta dokumen tertulis yang dimiliki oleh responden.

Ketiga, kecukupan referensial. Konsep kecukupan referensial ini mula-mula diusulkan oleh Eisner sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Selain itu juga masih bisa digunakan cara lain, misalnya ada informasi yang tidak direncanakan, kemudian disimpan. Sewaktu mengadakan pengujian, informasi demikian lalu dimanfaatkan untuk keperluan itu (Moleong, 2002: 181). []

BAB II

PARADIGMA AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT

Kerangka teori buku ini akan disajikan secara sistematis mengenai kajian tentang: 1) gerakan sosial, 2) konsep dinamika, 3) dinamika kelompok masyarakat, 4) teori perilaku kolektif (*collective of behaviour*), dan 5) kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa temuan di lapangan.

A. Gerakan Sosial

Giddens (1993) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga yang mapan (Suharko, *Gerakan Sosial*, Malang: Averroes Press, 2006: 1). Pengertian yang nyaris persis diutarakan oleh Tarrow (1998) yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya (*Ibid.*: 1-2). Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan

mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif (*collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembagakan ataupun cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya, tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang bergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi – institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat seperti negara.

Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok ‘bawah tanah’ (*underground groups*). Lebih jauh gerakan sosial perlu dibedakan dengan sejumlah pengorganisasian sosial berikut (*Ibid.*:2-3). *Pertama*, meskipun berbeda, gerakan sosial dan organisasi formal kadang-kadang memiliki batasan yang kabur, karena gerakan sosial yang berubah menjadi mapan biasanya memiliki karakteristik birokratis. Karena itu, gerakan sosial secara gradual bisa berubah menjadi organisasi formal. Sementara itu, sangat jarang suatu organisasi formal berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Kedua, meski tidak terlalu mudah, gerakan sosial juga perlu dibedakan dengan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*), yakni suatu asosiasi yang dibentuk untuk para pembuat kebijakan dalam cara yang menguntungkan anggota-anggotanya. Menurut Doug McAdam dkk (2004), gerakan sosial memiliki semacam siklus

kehidupan yakni diciptakan, tumbuh, mencapai sukses atau gagal, terkadang bubar, dan berhenti atau hilang eksistensinya (*Ibid.*: 8-9).

Para teoritis gerakan sosial dari berbagai perspektif dan berbagai negara kurang lebih memiliki semacam titik temu bahwa setidaknya ditemukan tiga faktor yang bisa menjelaskan siklus gerakan sosial tersebut.

1. Kesempatan Politik

Para teoritis gerakan sosial menegaskan pentingnya suatu sistem politik dalam menyediakan kesempatan bagi aksi-aksi kolektif. Teoritis dari Amerika Serikat mencari penjelasan dari kemunculan gerakan sosial tertentu pada basis perubahan-perubahan dalam struktur kelembagaan atau relasi-relasi kekuasaan informal dalam suatu sistem politik nasional. Menyusul kemudian dengan nada sedikit berbeda, teoritis Eropa berusaha menemukan kemunculan gerakan sosial dengan bertolak dari perbedaan-perbedaan dalam struktur, luas, dan keberhasilan gerakan sosial secara komparatif lintas negara pada basis perbedaan dalam karakteristik-karakteristik negara bangsa di mana kesemua itu melekat.

2. Struktur Mobilisasi

Struktur mobilisasi dapat diartikan sebagai wahana-wahana kolektif, baik formal maupun informal yang dipergunakan oleh orang-orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri dalam aksi kolektif. Wahana-wahana kolektif tersebut bisa berupa kelompok, organisasi dan jaringan informal yang berada pada level *meso* (menengah). Dua perspektif teoritis mengajukan penjelasan yang sedikit berbeda tentang struktur mobilisasi.

3. Proses Pembingkaihan (*Framing*).

Merujuk ke definisi David Snow, proses framing diartikan sebagai “upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang

dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif.” Dalam banyak kasus gerakan sosial, isu ketidakadilan (*injustice*) merupakan bingkai yang paling sering dipergunakan untuk mendefinisikan kondisi yang dialami dan dihadapi oleh partisipasi gerakan.

Munculnya gerakan sosial disebabkan oleh, *pertama*, hubungan antara proses *framing* dan suatu pemikiran tentang perubahan politik ‘objektif’ yang memfasilitasi kemunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong mobilisasi tidak hanya melalui pengaruh ‘objektif’ yang diakibatkan oleh perubahan relasi kekuasaan tetapi juga oleh *setting* dalam pergerakan proses *framing* yang selanjutnya menggerogoti legitimasi sistem.

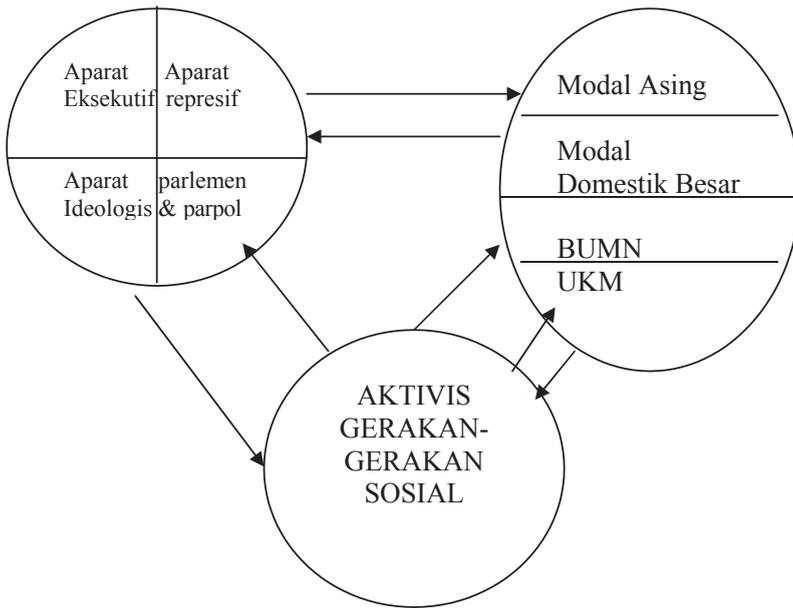
Kedua, suatu gerakan sosial bisa muncul karena kaitan resiprokal antara proses *framing* dan mobilisasi. Proses *framing* secara jelas mendorong mobilisasi ketika orang-orang berupaya mengorganisasi dan bertindak pada basis kesadaran yang berkembang tentang ketidakabsahan dan kerentanan sistem. Pada saat yang sama, potensi bagi proses *framing* yang kritis dikondisikan oleh akses orang-orang kepada berbagai struktur mobilisasi.

Dan hal ini akan mungkin terjadi dalam kondisi organisasi yang kuat daripada organisasi yang lemah. Dengan kata lain, proses *framing* tidak akan terjadi dalam kondisi ketiadaan organisasi, karena ketiadaan struktur mobilisasi hampir pasti akan mencegah penyebaran *framing* ke jumlah minimal orang yang diperlukan untuk basis tindakan kolektif.

Memahami dinamika suatu gerakan kemasyarakatan, lama maupun baru tidak akan lengkap kalau tidak berusaha memahami medan kekuatan (*force field*) di mana gerakan kemasyarakatan itu beroperasi. Kedua kekuatan besar yang perlu diteliti interaksinya dengan gerakan-gerakan kemasyarakatannya (*social movements*)

adalah Negara, dengan segala komponennya dan modal dengan segala komponennya yang dapat dilihat pada skema di bawah ini (Silaen, Victor, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: IRE Press, 2006: xxxvi).

Skema 1.1. Interaksi antara Negara, Modal, dan Gerakan Kemasyarakatan



Penelitian mengenai gerakan perlawanan petani atau masyarakat desa secara garis besar dibagi menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan moral- ekonomi, pendekatan historis, dan pendekatan ekonomi politik (Azhar, Ipong S, *Radikalisme Petani Masa Orde Baru*, Yogyakarta: PT Tarawang, 1999: 13-14). Pendekatan moral ekonomi berasumsi gerakan perlawanan petani semata-mata didasari oleh moralitas tradisional yang berorientasi ke masa lalu dan masa kini saja sehingga ketika terjadi perubahan yang tidak sesuai atau dirasakan mengancam kelangsungan kehidupan yang telah mereka miliki, para petani kemudian mengadakan reaksi sampai ke

taraf yang paling ekstrem, yaitu mengadakan perlawanan terbuka. Pendekatan historis memandang nilai, norma, tradisi, kepercayaan, dan mitos yang telah dimiliki dan diwarisi secara turun temurun oleh para petani sebagai sesuatu yang *crucial*. Pendekatan ekonomi politik berasumsi bahwa gerakan perlawanan petani sebenarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual para petani terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan bahkan mengancam mereka. Atau sekurang-kurangnya, perubahan ini dinilai telah menghalang-halangi usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup (dengan demikian pendekatan ini berasumsi bahwa petani juga berorientasi pada masa depan).

Karya tulis klasik dari Henry A Lands berger (1974), "*Peasant Unrest: Themes and Variations*" telah memberi kerangka analitis yang dahulu banyak dirujuk para akademisi untuk memahami, menganalisa dan melukiskan gerakan rakyat petani. Kerangka itu terdiri dari tujuh golongan tematik yakni: 1) perubahan kemasyarakatan yang mendahului Gerakan Petani, 2) sasaran dan ideologi gerakan, 3) sasaran dan metode gerakan, 4) dasar masa dari gerakan, 5) kondisi yang memperlancar gerakan, 6) sekutu-sekutu gerakan, 7) kondisi-kondisi yang memberhasilkan dan menggagalkan (Fauzi, Noor, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press, 2005: 136).

Strategi-strategi gerakan yang sering diterapkan oleh komunitas lokal di Indonesia untuk mencapai tujuan dibagi menjadi: strategi organisasi, strategi lobi, demonstrasi, strategi pendudukan lahan, dan strategi kekerasan (Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria*, Padang: Andalas University Press, 2006:42). Pada umumnya, penduduk/komunitas tempatan mengkombinasikan strategi-strategi di atas dan pada dasarnya penerapan strategi itu bertahap.

Dalam melakukan penelitian mengenai gerakan sosial juga perlu dipahami mengenai gerakan-gerakan pro-demokrasi di masa

Orde Baru untuk dapat memahami fenomena secara komperhensif. Gerakan pro-demokrasi yang muncul di zaman pemerintahan Orde Baru, bukanlah gerakan dari satu jenis saja, tetapi juga dari berbagai jenisnya, yaitu: gerakan koreksi, gerakan konfrontasi, gerakan regional dan internasional, gerakan pers, dan gerakan partai (Budiman, Arief, Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi*, PT Sembrani Aksara Nusantara, 2001: xxvii).

Gerakan-gerakan sosial yang berbeda tipenya terbukti secara ekstrem bersifat bergerak (*mobile*) dan bahkan mampu melewati batas-batas nasional dengan mudah. Setidaknya, ada empat aspek dalam gerakan sosial yang seringkali ditiru oleh gerakan sosial di tempat yang lain, yaitu: adanya ide-ide yang luas, pembentukan aksi publik, pengorganisasian sarana, serta penggunaan simbol atau slogan (Nugroho, Heru, *Gelombang Demokrasi Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002: 50).

Dalam konteks kelompok berkedudukan rendah seperti petani, yang dimaksudkan dengan sebuah gerakan adalah *setiap reaksi kolektif terhadap kedudukan rendah itu*. Di sini lagi-lagi posisi kita adalah: *pertama*, pendekatan yang luas dan melingkupi merupakan hal yang diharapkan: dan *kedua* persoalan itu seharusnya tidak dikemukakan dalam ukuran, apakah suatu kumpulan itu adalah gerakan atau bukan gerakan?

Secara khusus, untuk memudahkan digunakan dimensi-dimensi di bawah ini: 1) tingkat adanya kesadaran bersama tentang nasib yang dialami, 2) tingkat di mana aksi itu bersifat kolektif baik dalam (a) lingkup orang yang terlihat dan (b) tingkat koordinasi dan organisasi aksi (sampai kepada titik yang tinggi ketika itu diorganisasi dengan cara yang kompleks), 3) lingkup di mana aksi itu bersifat 'instrumental': dirancang untuk mencapai sasaran di luar aksi itu sendiri dan kadar ekspresinya dilaksanakan karena gratifikasi yang terkandung di dalam aksi itu sendiri, 4) tingkat di

mana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi dan politik, berlawanan dengan reaksi di mana isu lain agama, nasional memainkan peranan yang murni dan merdeka (Landsberger, Henry A, YU.G.Alexandrov, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1984: 24-25).

B. Dinamika Kelompok Masyarakat

Dinamika adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam hubungan yang dapat menimbulkan perubahan di dalam tatanan hubungan yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, dinamika dapat pula diartikan sebagai gambaran tentang pergerakan sosial yang terarah pada pergeseran pola-pola sosial formal dan informal. Hal ini bisa menggejala pada perubahan/ pergeseran bentuk (struktur) dan aktivitas sosial yang bermotif reaksi pertahanan diri dan perlawanan atas desakan-desakan ekstern.

Robert L. Baker dalam *The social Work Dictionary* mendefinisikan *group dynamics: the follow of information and exchange of influence between members of social collective. These exchange can be modified by groups leaders or helping profesional and used to achieve certain predetermined objectives that may benefit the members* (dinamika kelompok adalah arus informasi dan pertukaran- pertukaran pengaruh antara anggota-anggota kolektif sosial. Pertukaran-pertukaran ini dapat diubah oleh para pemimpin kelompok atau para ahli pertolongan dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang menguntungkan bagi anggota-anggotanya) (Huraerah, Abu dan Purwanto, *Dinamika Kelompok*, Bandung: Refika Aditama, 2006).

Eysenck mengatakan dinamika kelompok adalah berkaitan dengan konteks sosial-budaya suatu masyarakat yang berfungsi untuk membantu individu dan kelompok sehingga memungkinkan mereka

secara bersama memiliki pola-pola merasakan, menilai, berfikir, dan bertindak. Selanjutnya, Cartwright dan Zender mengemukakan bahwa dinamika kelompok adalah suatu cara yang berkaitan dengan ideologi politik di mana kelompok harus diorganisasikan dan dikelola. Ideologi ini menekankan pentingnya kepemimpinan demokrasi, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan aktivitas kerjasama antara individu dengan masyarakat dalam kelompok.

Aspek-aspek dinamika kelompok yaitu: komunikasi di dalam kelompok, konflik di dalam kelompok, kekuatan di dalam kelompok, kohesi kelompok, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (*Ibid.*:34-52).

1. Komunikasi Kelompok

Faktor komunikasi di dalam kelompok sangatlah berperan pada dinamika yang terjadi dalam kelompok. Hal ini karena di dalam komunikasi, akan terjadi perpindahan ide atau gagasan yang diubah menjadi simbol oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui media.

2. Konflik di dalam Kelompok

Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan (Santosa, 1983: 32). Sedangkan sebab terjadinya konflik antara lain: 1) adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu, sehingga terjadi konflik diantara mereka, 2) adanya perbedaan kepribadian di antara mereka, yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, 3) adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka, dan 4) adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai/sistem.

3. Kekuatan di dalam Kelompok

Di dalam interaksi ada kekuatan atau pengaruh. Anggota kelompok menyesuaikan satu dengan lainnya dengan berbagai cara. Mereka mempercepat dan memperlambat aktivitasnya untuk dapat berkoordinasi di antara mereka. Anggota kelompok yang berinteraksi, secara tetap mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan dan memelihara kelompok. Keputusan tidak mungkin ditetapkan tanpa kekuatan anggota-anggota kelompok. Minat-minat yang bertentangan dan konflik tidak mungkin dapat diatur tanpa menggunakan kekuatan. Tidak ada komunikasi tanpa pengaruh, yang berarti tidak ada komunikasi tanpa kekuatan. Dengan demikian, kekuatan merupakan hal yang esensi bagi semua aspek keberfungsian kelompok.

4. Kohesi Kelompok

Kohesi kelompok didefinisikan sebagai sejumlah faktor yang mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota kelompok tersebut. Ketertarikan pada kelompok ditentukan oleh kejelasan tujuan kelompok, kejelasan keberhasilan pencapaian tujuan, karakteristik kelompok yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi, kerjasama antar anggota kelompok dan memandang kelompok tersebut lebih menguntungkan dibanding dengan kelompok-kelompok lain.

5. Pengambilan Keputusan

Keputusan yang dihasilkan merupakan produk kesepakatan anggota-anggota kelompok untuk melakukan sesuatu dan biasanya merupakan hasil pemilihan dari beberapa kemungkinan yang berbeda.

6. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah merupakan fokus utama dari ketrampilan kelompok. Masalah adalah pertentangan atau perbedaan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya.

Adapun unsur-unsur dinamika kelompok meliputi (*Ibid.*: 57-66):

1. Tujuan Kelompok

Johnson dan Johnson mengungkapkan pengertian tujuan kelompok sebagai suatu keadaan di masa mendatang yang diinginkan oleh anggota-anggota kelompok dan oleh karena itu mereka melakukan berbagai tugas kelompok dalam rangka mencapai keadaan tersebut. Tujuan kelompok biasanya dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan-tujuan individual dan tujuan-tujuan semua anggota kelompok (Carrolina Nitimihardjo dan Jusman Iskandar, 1993: 43).

2. Kekompakan Kelompok

Catwright dan Zander merumuskan pengertian kekompakan kelompok sebagai hasil dari semua tindakan yang memperkuat anggota kelompok untuk tetap tinggal (berada) dalam kelompok.

3. Struktur Kelompok

Shaw mengemukakan bahwa struktur kelompok adalah pola-pola hubungan diantara berbagai posisi dalam suatu susunan kelompok. Dalam menganalisis struktur kelompok, maka ada tiga unsur penting yang terkait dalam struktur kelompok yaitu; posisi, status, dan peranan perlu ditelaah.

4. Fungsi Tugas Kelompok

Shaw (1977:317) telah mengelompokkan tugas-tugas kelompok ke dalam tiga jenis yaitu : tugas-tugas produksi (*production task*), tugas-tugas diskusi (*discussion task*), dan tugas-tugas pemecahan masalah (*problem solving task*).

5. Pengembangan dan Pemeliharaan Kelompok

Pengembangan dan pemeliharaan kelompok adalah berkaitan dengan “apa yang harus ada” dalam kelompok.

6. Suasana Kelompok

Suasana kelompok adalah suasana yang terdapat dalam suatu kelompok, sebagai hasil dari berlangsungnya hubungan-hubungan interpersonal atau hubungan antar anggota kelompok.

7. Efektivitas Kelompok

Kelompok yang efektif mempunyai tiga aktivitas dasar: aktivitas pencapaian tujuan, aktivitas memelihara kelompok secara internal, aktivitas mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan kelompok.

8. Tekanan Kelompok

Tekanan kelompok (*group pressure*) berbeda dengan kelompok tekanan (*pressure group*). *Group pressure* yaitu tekanan/desakan yang berasal dari kelompok itu sendiri. *Pressure group* mengacu pada tekanan/desakan yang berasal dari luar kelompok atau adanya kelompok tandingan berupa desakan-desakan kelompok lain terhadap suatu kelompok.

9. Maksud Terselubung

Johnson dan Johnson mengemukakan bahwa maksud-maksud terselubung (*hidden agendas*) adalah tujuan perorangan (pribadi) yang tidak diketahui oleh anggota-anggota kelompok lainnya dan tujuan tersebut seringkali berlainan atau berlawanan dengan tujuan kelompok yang dominan (Carolina Nitimiharjo dan Jusman Iskandar, 1993: 53).

C. Teori Perilaku Kolektif (*Collective of Behaviour*)

Menurut para sosiolog, istilah perilaku kolektif secara harfiah mengacu pada “perilaku serta bentuk-bentuk peristiwa sosial lepas (*emergent*) yang tidak dilembagakan(*extra-institutional*).” Kalimat ini digunakan oleh Asosiasi Sosiologi Amerika untuk menyebut perilaku kolektif dan gerakan sosial-kepanikan, kekacauan, dan kerumunan suka ria merupakan bagian dari ekspresi-ekspresi definisi tersebut (Lofland, John, *Protes*, Yogyakarta: Insist Press, 2003). Analisis mengenai gerakan kemasyarakatan dan perilaku kolektif sebagai sebuah cabang studi modern mempunyai asal-usulnya pada akhir abad ke sembilan belas (Mirsell, Robert, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2004: 36).

Studi mengenai perilaku kolektif diawali dengan pandangan negatif terhadap tingkah laku kerumunan dan gerakan kemasyarakatan. Penilaian negatif Gustav LeBon (1897) dan Gabriel Tarde (1903) tentang kerumunan dan pandangan yang dismitif dari Sigmund Freud tentang psikologi kelompok (1921/1959), misalnya bergema kembali pada awal abad ke-20 di dalam karya Robert Park dan E Burgess (*Ibid.*: 37). Park berjasa sebagai pengguna pertama istilah “perilaku kolektif.” Tulisannya bersama Burgess memperlihatkan pengaruh Lebon dalam penggunaan sejumlah konsep seperti “sugestibilitas,” “ketularan” (*contagion*), dan “kepatuhan kerumunan” kepada seorang pemimpin (*Ibid.*). Park dan Burgess juga menjelaskan bahwa perilaku kolektif merupakan sebuah kekuatan yang dapat membawa perubahan (*Ibid.*). Sejak awal tahun 1903, Park telah mengemukakan bahwa kerumunan dan publik mengakhiri ikatan-ikatan lama dan membawa individu ke dalam jalinan hubungan-hubungan baru (Turner dan Killian, 1987).

Park dan Aliran Chicago memainkan peranan penting dalam menggeser bidang akademik sosiologi yang baru muncul dari teori-teori berskala besar, yakni teori-teori mengenai struktur dan

perubahan sosial, kepada studi-studi empiris berskala kecil yakni mengenai proses-proses sosial (*Ibid.*). Dengan adanya pergeseran umum ini lahir pula batasan pertama tentang cabang sosiologi perilaku kolektif dan gerakan kemasyarakatan di dalam pembaharuan politik dan perubahan sejarah, melainkan kepada faktor-faktor tingkah laku kerumunan dan psikologi sosial di dalam pembentukan sebuah gerakan kemasyarakatan.

Herbert Blumer (1946), menerbitkan sebuah artikel kunci mengenai pendekatan interaksionisme simbolis terhadap cabang sosiologi gerakan kemasyarakatan dan perilaku kolektif (*Ibid.*: 44). Bagi Blumer seperti juga bagi pendukung teori interaksionisme simbolis lainnya, gerakan kemasyarakatan dan perilaku kolektif mesti dipahami sebagai usaha kolektif untuk membangun sebuah orde sosial yang baru (*Ibid.*: 45). Semua fenomena sosial mesti dimengerti sebagai tindakan-tindakan yakni pembentukan-pembentukan dunia sosial yang berkelanjutan dan berproses. Tindakan-tindakan ini didasarkan pada komunikasi dalam bentuk simbol-simbol. Melalui tindakan-tindakan dan interaksi-interaksi simbolis ini, individu-individu secara tetap bernegosiasikan kembali representasi-representasi simbolis yang mereka ciptakan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang-orang lain (*Ibid.*).

Blumer dan para pendukung teori interaksi sosial ini tidak membuat perbedaan yang rapi dan tegas antara tingkah laku yang terlembaga dan yang tidak terlembaga, antara gerakan-gerakan dan perilaku kolektif di satu sisi dengan struktur di sisi lainnya. Perilaku kolektif bersifat situasional dan spontan lebih spontan dan kurang terprogram di bawah kebiasaan atau aturan-aturan jika dibandingkan dengan tindakan-tindakan manusia lainnya (*Ibid.*). Blumer berbeda dengan banyak penganut teori psikologi sosial lainnya yaitu bahwa dia “tidak menganggap perilaku kolektif sebagai perilaku patologis dan destruktif (*Ibid.*).

Smelser ingin menganalisa perilaku kolektif. Adapun tipe-tipe yang diteliti adalah: reaksi terhadap panik, reaksi terhadap *craze*, ledakan permusuhan, gerakan yang berorientasi pada norma dan gerakan yang berorientasi pada nilai. Smelser juga menegaskan tentang adanya keuntungan jika kita mempelajari aksi kolektif (Smelser, Neeil, J. *Theory of collective behaviour*, New York: The Free Press, 1962: 1-2 dalam Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Petani*, Malang: UMM Press, 2005: 12). Menurutnya, dalam kondisi interaksi yang stabil, berbagai elemen sosial seperti *myths*, ideologi, potensi untuk terjadinya kekerasan adalah berada dalam posisi yang terkontrol sehingga tidak siap untuk diobservasi. Tetapi dalam episode perilaku kolektif, elemen-elemen ini menjadi terbuka, kita bisa mengobservasi dalam arti *in the raw*.

Dengan mengikuti klasifikasi yang dibuat oleh Sing, maka studi Smelser dapat dikategorikan dalam tradisi teoritik neo-klasik. Sing membagi tradisi teoritik atas studi gerakan sosial menjadi tiga yaitu tradisi teoritik klasik, neo-klasik, dan gerakan sosial baru (Sing, Rajendra, *Social Movement, Old and New: A Post Modernis Critique*, Sage Publication, New Dehli/ Thousand Oaks/ London: 89 dalam Wahyudi, 2005: 12). Tradisi klasik menstudi jenis perilaku kolektif seperti kerumunan, kerusuhan, dan kelompok pemberontak dari pendekatan psikologi sosial. Tradisi ini ada dalam periode sebelum 1950-an. Tradisi teoritik neoklasik berkaitan dengan studi terhadap gerakan sosial 'tua'. Kebanyakan tulisan-tulisannya dipublikasikan setelah tahun 1950-an dan ini merupakan kontribusi dari ilmuwan Barat dan India. Tradisi ini mengikuti kerangka pemikiran Fungsionalis (Parsonian) dan dialektik Marxis (*Ibid.*:13).

Klasifikasi ketiga adalah berupa gerakan sosial kontemporer atau 'baru' yang mana muncul di Amerika dan Eropa pada sekitar tahun 1960 dan 1970. Gerakan sosial tipe ini mengusung isu: humanitas, budaya, dan hal-hal non matrealistik. Tujuan gerakannya

universalistik, yakni untuk mempertahankan esensi manusia dan memproteksi kondisinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*Ibid.*).

Karl Mark dapat dianggap Fungsionalis, sebab ia punya gagasan: a) konsepsi masyarakat sebagai suatu totalitas yang berisi bagian-bagian atau klas, b) konsepsi tentang beberapa bentuk interaksi antara *the parts* dengan *the totality*, c) adanya ide tentang *essentialist* yang evolusioner bahwa masyarakat bergerak melalui tingkat unilinear ke atas, dan d) optimistik utopia tentang peristiwa *'establishment a new classless totality of society* (*Ibid.*).

Sebaliknya, Parsons menekankan asumsi-asumsi: a) problem ketidakaturan itu bersifat endemik di dalam sistem kemasyarakatan, b) keteraturan dan ketidakaturan merupakan ekspresi yang alamiah dari setiap sistem, c) ekspresi-ekspresi ini barangkali muncul dari berbagai *the parts* sistem-sistem itu, misal kepribadian, budaya dan masyarakat itu sendiri atau dari interaksinya dengan bagian yang lain, d) pergumulan antara dialektik keteraturan dan ketidakaturan, umumnya, yang lama berhasil mempengaruhi yang baru serta berlanjut terus melalui perjalanan universal yang esensial dari suatu evolusi (*essentialist universal passages of evolution*) (*Ibid.*).

Sing yang meninjau karya Sydney Hook (1950) memaparkan pemikiran dialektik yang menurutnya berimplikasi pada: *pertama*, keberadaan setidaknya dua elemen variabel atau elemen atau entitas sosial. Marxis: klas borjuis dan proletar. Dahrendorf dan Mosca: *ruling and ruled class*, Freud: id dan superego dalam kepribadian individu. Mannheim: ideologi dan utopia. *Kedua*, oposisi antara variabel dan entitas merupakan proses gerakan untuk mendewasakan ke arah peningkatan integrasi yang lebih tinggi. *Ketiga*, oposisi dan integrasi memiliki dimensi sejarah di dalamnya terkandung pemikiran evolusi (*Ibid.*: 14).

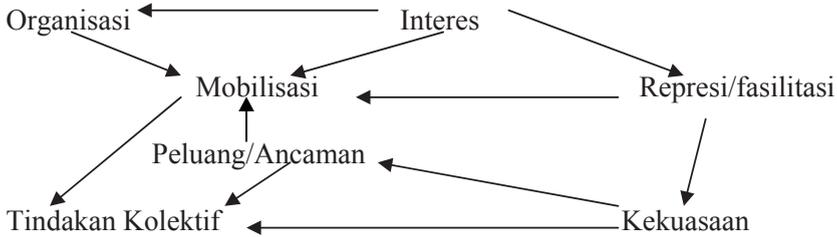
Menurut Tilly dkk (*Ibid.*), berbagai tindakan kolektif di abad ke-19 memiliki tiga bentuk yang berbeda, yakni tindakan kompetitif, reaktif, dan pro aktif. Dalam satu gerakan sosial, menurutnya bisa memiliki lebih dari satu tipe gerakan. Gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kompetitif atau reaktif.

Charles Tilly (*Ibid.*: 24) dalam tulisannya yang berjudul *From Mobilization to Revolution*. Menurutnya, teori tindakan kolektif adalah teori yang mengkaji di mana manusia melakukan tindakan bersama untuk mengejar tujuan bersama. Analisis terhadap aksi kolektif memiliki lima komponen besar, yakni kepentingan (*interest*), organisasi, mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan tindakan kolektif itu sendiri (*Ibid.*).

Dalam karya Tilly, aspek kepentingan dimaksud berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kehidupan politik. Aspek organisasi berkaitan dengan organisasi yang *well-defined groups*. Aspek mobilisasi berkaitan dengan faktor- faktor produksi seperti: tanah, pekerja, kapital, dan teknologi. Dalam kaitan dengan aspek mobilisasi ini, Tilly mengabaikan faktor sikap sebagai salah satu *resources* yang penting. Dalam aspek *opportunity* berkaitan dengan peluang politik, peluang koalisi, tingkat represi atau ancaman, serta relasi antara pemerintah dengan *contender* yang berjuang untuk mendapatkan *power*. Sedangkan dalam aspek tindakan kolektif adalah berkaitan dengan konflik kepentingan (*Ibid.*: 25).

Charles Tilly (*Ibid.*: 28) yang mengembangkan model mobilisasi dalam tindakan kolektif mengatakan bahwa, *the main determinants* dari mobilisasi kelompok itu meliputi: organisasi, interes, peluang atau ancaman, dan kemampuan kelompok dalam menyikapi represi atau fasilitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Skema I.2.
Model Mobilisasi Charles Tilly



Dalam diagram tergambar bahwa kemampuan kelompok atas tindakan represi merupakan fungsi pokok atas berbagai sifat interes yang muncul. Tindakan kolektif yang dilakukan oleh contender adalah merupakan resultante dari aspek- aspek kekuasaan (*power*), mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan ancaman yang saling berhadapan dengan interes yang ada.

Gurr mengatakan perilaku kolektif bisa disebabkan oleh rasa ketidak- senangan. Sedangkan rasa ketidak-senangan merupakan produk dari ketidak- sesuaian antara kondisi obyektif dan ide- ide tentang kondisi tersebut (Smelser, Neil, J, *Sociology*, dalam Wahyudi 2005: 14). Ketidaksenangan adalah produk kesenjangan antara kenyataan dan keinginan. Oberschall (*Ibid.*) menambahkan, ketidaksenangan juga dapat disebabkan oleh adanya rancangan struktur sosial yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok yang lain.

Menurut Smelser (*Op.Cit.:* 14) manusia memasuki episode perilaku kolektif karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya. Kebanyakan formulasi ketegangan struktural itu tidak sistematis. Semakin berbagai ketegangan muncul, maka akan semakin cenderung muncul pula episode perilaku kolektif. Kata Smelser “*any kind of strain may be a determinant of collective behaviour.*”

Menurut Smelser (*Ibid.*) ketegangan struktural itu terkait dengan persoalan-persoalan: fasilitas situasional, mobilisasi motivasi, orientasi norma, dan orientasi nilai dalam gerakan. Ketegangan struktural yang terkait dengan fasilitas situasional mencakup kondisi ambiguitas dalam mencapai tujuan gerakan.

Dalam hal ini, ada tiga ambiguitas yang dilihat oleh Smelser, yakni: a) ambiguitas di dalam mengalokasikan fasilitas untuk mencapai tujuan yang operatif, b) ambiguitas di dalam mengalokasikan fasilitas untuk organisasi, dan c) ambiguitas di dalam mengalokasikan fasilitas untuk sektor-sektor kemasyarakatan.

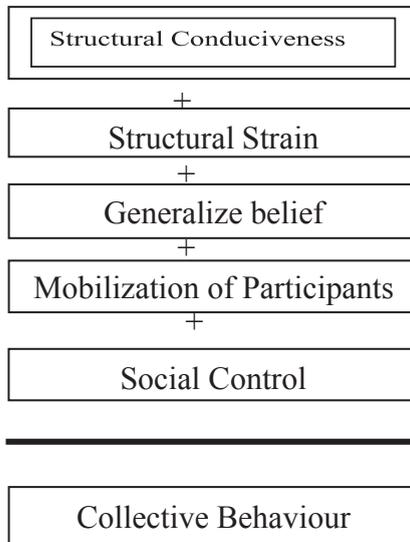
Ketegangan struktural yang terkait dengan upaya mobilisasi motivasi adalah sebagai berikut: a) deprivasi aktual atau potensial di dalam penampilan peran, b) deprivasi aktual dan potensial yang berhubungan pada keanggotaan organisasional, c) deprivasi aktual atau potensial mengenai sektor-sektor sosial.

Ketegangan struktural yang terkait dengan orientasi norma adalah: a) konflik atas aturan-aturan yang bersifat operatif, b) ketegangan pada integrasi organisasi, c) ketegangan hubungan di antara sektor-sektor sosial. Sedangkan ketegangan struktural yang terkait dengan orientasi nilai adalah: a) ketegangan bagi komitmen bagi nilai-nilai personal, b) ketegangan bagi tujuan-tujuan organisasional, dan c) ketegangan pada prinsip-prinsip mengenai integrasi nilai-nilai.

Smelser mengembangkan skema nilai tambah (*value added*) untuk menganalisa penentu perilaku kolektif (Locher, David A, *Collective Behaviour*, Prentice hall, New Jersey: Upper Saddle River, 2005: 40). Penentu-penentu penting perilaku kolektif (*the important determinants of collective behaviour*) tersebut meliputi: a) kondusifitas struktural, yakni *setting* di mana perilaku kolektif dapat berlangsung, b) ketegangan struktural, yakni memburuknya hubungan di antara komponen tindakan dan sebagai konsekuensinya terjadi

kemunduran fungsi dari komponen–komponen tindakan atau terjadi *unwillingness* dalam mengikuti pola–pola tindakan yang sudah diatur secara institusional, c) tumbuh dan menyebarnya kepercayaan umum, yakni sesuatu yang mengidentifikasi sumber ketegangan kemudian menghubungkan karakter–karakter tertentu sumber itu, dan akhirnya menentukan respon tertentu atas ketegangan yang ada, d) faktor–faktor yang mempercepat, atau peristiwa yang menjadi pemicu, e) mobilisasi partisipan untuk bertindak. Faktor ini disebut juga sebagai awal mulainya perilaku kolektif aktual dan f) dilakukan atau dilaksanakannya *control social*.

Skema. 1. 2.
**The development of Collective Behaviour from
the Value Added Perspective**



Kesuksesan gerakan sosial tidak hanya tergantung pada pemimpinnya tetapi juga pengikutnya. Pertanyaannya, orang yang bagaimana yang tertarik mengambil bagian dalam gerakan social? Eric Hoffer (Smelser, *Op.Cit.*:16) menunjukkan bahwa orang yang

frustasi, atau orang yang kehidupannya kurang terarah memiliki peluang tinggi untuk berpartisipasi. Namun, tidak demikian menurut Gamson (*Ibid.*) bahwa keikutsertaan partisipan itu bukan karena motif pribadi, tetapi justru untuk memenuhi kebutuhan kolektif.

Sedangkan menurut Oberschall (*Ibid.*), orang-orang yang secara politik telah aktif akan dapat berfungsi sebagai sumber gerakan yang besar. Di samping itu anggota gerakan menurut Kronus (*Ibid.*) juga dapat diambil dari suatu kelompok gerakan yang memiliki komitmen yang sama .

Dalam dimensi tertentu, telaah terhadap perilaku kolektif tidak bisa dilepas dari upaya untuk memahami Teori Mobilisasi Sumber(TMS). TMS dibangun dari pemikiran Mancur Olson's (Sing, Rajendra, *Op. Cit.*:16) dalam *The Logic of Collective Action* yang mengatakan bahwa: "gerakan kontemporer memerlukan bentuk-bentuk komunikasi dan organisasi yang sempurna daripada sekedar drum dan terompet sebagaimana yang ada dalam gerakan lama." Olson's lebih menekankan adanya peran dari faktor-faktor objektif seperti: interes, organisasi, sumber, strategi, dan peluang dari berbagai mobilisasi kolektif yang berskala besar. Ia tidak setuju dengan konsepsi Bon's yang menyebutkan bahwa orang-orang yang ada di dalam kerumunan itu bersifat tidak rasional. Olson's lebih memakai pendekatan murni utilitarianisme dan rasionalitas (*Ibid.*).

Meminjam pemikiran yang bersifat instrumentasi utilitarian, Sing setuju pada Rude's dan Thomson's bahwa aktor di dalam kerumunan selanjutnya juga di dalam gerakan kontemporer itu bersifat rasional karena mereka mempunyai kemampuan dalam penalaran, serta perhitungan sukses atau pun kegagalan.

Sedangkan Mc.Charty dan Zald (*Ibid.*:17) dalam menjelaskan persoalan TMS lebih menekankan pada adanya spirit dari organisasi dalam memobilisasi gerakan sosial kontemporer. Mereka ini

tidak bisa menerima pemikiran Olson's yang disebutnya *the ultra-rationalistic individual* (misal, kalkulasi cost dan benefit). Melalui paradigma konflik politik, Charthy dan Zald lebih menekankan pada peran kelompok solidaritas dengan kepentingan kolektif dalam tindakan sosialnya (*Ibid.*).

Para aktor di dalam tindakan kolektif kontemporer secara sadar berjuang untuk menghadapi kekuasaan demi secara sosial untuk menyusun identitas baru dan untuk menciptakan wilayah demokratik bagi otonomi tindakan sosial. Oleh sebab itu bagi Cohen (*Ibid.*) yang terpenting adalah:

- a) menemukan kondisi gerakan, faktor-faktor, dan kekuatan-kekuatan dengan mempergunakan upaya yang dilakukan oleh para aktor kolektif dalam menciptakan identitas, solidaritas, dan pertahanan mereka,
- b) menguji hubungan antara lawan dan isu tentang konflik, dan
- c) mengidentifikasi latar belakang sosial dan kultural tindakan kolektif sebagaimana kondisi ini membentuk refleksifitas dan kesadaran para aktor di dalam situasi konkret tindakan kolektif atau gerakan sosial.

Smelser adalah sosiolog yang mencoba mengawinkan pemikiran Le Bon dan Park's, Parson's serta Karl Marx (Rule, James B. (1988) *Theoris of Civil Violence*, dalam Wahyudi, 2005: 17). Dari Le Bon dan Park ia mengembangkan pokok persoalan perilaku kolektif, yakni mengenai tindakan kolektif, gerakan sosial, atau revolusi. Dari Parsons ia mengambil konsep tindakan sosial dan keteraturan sosial (fungsionalis) untuk menggambarkan bagaimana individu berperilaku dalam hubungan sosialnya, sedangkan Marx ia mengambil pemikiran dialektik dan menggambarkan perkembangan masyarakat dengan sifat yang linier.

Parsons dan Shils mendefinisikan tindakan dari sudut pandang aktornya. Menurutnya tindakan itu terbentuk atas dasar interaksi antara dua aktor atau lebih. Oleh karenanya, kepribadian individu itu dianggap sebagai sistem yang prinsipil. Dalam level sistem sosial, unit analisisnya adalah bukan kecenderungan kebutuhan atau motif dari aktor, tetapi peran aktor dan organisasi yang ada.

Dengan mengambil pemikiran Parsons dan Shils, Smelser mengembangkan pemikiran tentang empat komponen dasar dari tindakan sosial, yakni: a) tujuan atau nilai umum, yang mana ia menyediakan pedoman untuk mengarahkan perilaku sosial, b) aturan-aturan yang telah teregulasi (ditemukan di dalam norma, bukan di nilai), yang mana ia mengarahkan upaya pencapaian tujuan, c) mobilisasi energi individu-individu untuk mencapai tujuan di dalam kerja normatif, d) fasilitas situasional yang terjangkau, yang mana aktor memanfaatkannya sebagai alat. Fasilitas situasional ini termasuk pengetahuan tentang lingkungan, prediksi dari konsekuensi tindakan, alat-alat yang ada serta ketrampilan yang dimiliki (*Ibid.*).

Smelser menganjurkan agar kita mempergunakan kata-kata yang tepat dalam memahami nilai, norma, komponen organisasi, fasilitas situasional. Saran dia adalah: a) dalam kaitannya dengan nilai, sikap yang relevan adalah: *belief in, commitment to, faith in, the value question*, b) dalam kaitannya dengan norma, sikap yang relevan adalah *conformity* atau *deviation*, c) dalam kaitannya dengan komponen organisasi, sikap yang tepat adalah: *responsibility* atau *lack of responsibility in a role*, d) dalam kaitannya dengan fasilitas situasional, sikap yang relevan adalah: *confidence* atau *lack of confidence* (*Ibid.*).

Tilly dkk, mengatakan bahwa perubahan besar di masyarakat akan mempengaruhi adanya gerakan sosial. Tetapi dalam hal ini, mereka tidak setuju Durkheimian dan Smelserian yang mengatakan, bahwa transformasi struktural besar pasti menyebabkan terjadinya '*collective disorder*' (*Ibid.*).

Rule⁶⁸ membahas sekaligus mengajukan pertanyaan tentang pemikiran Smelser (Rules, James B. (1998), *Op.Cit.*:19). Rule menyebutkan, oleh karena Smelser memahami perilaku kolektif sebagai sesuatu yang bertentangan dengan cara-cara bertindak yang institusional dan normatif dan ketegangan struktural didefinisikan sebagai adanya kecenderungan pertentangan pola normatif institusional, maka berarti tidak mungkin kita membayangkan perilaku kolektif jika tidak disertai adanya elemen-elemen yang tidak terganggu. Dalam definisi Smelser, perilaku kolektif tanpa adanya beberapa bentuk ketegangan struktural secara logika adalah tidak mungkin terjadi. Rule menegaskan realitanya tidak selalu seperti pemikiran Smelser itu.

Rule juga melihat bahwa smelser belum menjawab dengan jelas tentang sumber penyebab dari terjadinya *discontent* yang dapat menimbulkan perilaku kolektif. Skema nilai tambah yang digagas Smelser juga merupakan teka-teki yang mempunyai kesulitan jika digunakan untuk memahami realita yang ada. Namun, Rule dapat memahami tentang adanya enam tingkat nilai tambah yang merupakan sesuatu yang implisit dalam definisi perilaku kolektif itu sendiri (*Ibid.*).

Aspek lain yang dikritik Rule adalah ketika ia harus memahami ketegangan struktural yang menurut Smelser dapat menimbulkan perilaku kolektif. Rule mempertanyakan ketegangan struktural yang bagaimana dapat menimbulkan perilaku kolektif. Apa jika tidak ada ketegangan maka tidak menimbulkan perilaku kolektif.

Dalam kritik Rule terhadap pemikiran Smelser, ia mengajukan pengandaian peristiwa panik. Tanya dia, jika ada peristiwa panik di *departement store*, misalnya ada genting yang jatuh, bagaimana dapat dikatakan 'formasi kepercayaan umum mengikuti ketegangan struktural' atau apakah di situ ada faktor yang mendahului? Berdasarkan pemikirannya ini Rule mengatakan: '*if would appear that the sequence exists only as part of the definition of the concept, or not at all*' (*Ibid.*).

Dengan mengikuti paradigma fungsionalis Parsons, Smelser memasukkan kelompok panik, *crazes*, kerusuhan dan ledakan kolektif permusuhan sebagai bentuk perilaku kolektif yang terkait dengan masalah 'sistem kepercayaan' yang kemunculannya otomatis. Pertanyaan Sing, apakah dalam pada itu hanya ada sistem kepercayaan yang tunggal, dan apakah sistem kepercayaan itu berbeda menurut klas dan hirarki masyarakat? Sing mengatakan bahwa bentuk tidak terstruktur atas fenomena perilaku kolektif, yang oleh Smelser diklasifikasikan sebagai tindakan kolektif yang tidak terinstitusionalisasikan adalah tidak dapat secara tegas disebut sebagai gerakan sosial karena tidak memiliki organisasi dan ideologi untuk melakukan perubahan.

Menurut Smelser, kekurangan yang ada dalam studi perilaku kolektif saat itu adalah bahwa dalam menstudi perilaku kolektif cenderung mempergunakan studi literatur. Oleh karena adanya kecenderungan di atas, maka yang didapat adalah deskripsi kasar tentang pengetahuan perilaku kolektif serta secara tidak relatif ada kesenjangan antara teori dan kenyataan yang terus tumbuh dan berkembang (Smelser, 1962: 20). Sehubungan dengan permasalahan di atas, Smelser menyarankan perlu dilakukannya berbagai penelitian lapangan tentang perilaku kolektif dengan alasan: a) perilaku kolektif itu bersifat spontanitas dan berubah-ubah, karenanya perlu dianalisis secara koherensi, b) beberapa perilaku kolektif dengan sedikit pengecualian tidak dapat dikontrol dengan eksperimen. Bahkan observasi sekalipun juga ada kesulitannya apalagi jika waktu dan tempat kejadian perilaku kolektif itu tidak dapat diprediksi secara tepat, dan c) sangat tidak mungkin untuk mengambil sampel pada kejadian perilaku kolektif dalam populasi yang besar (*Ibid.*).

Sing memiliki persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap gagasan Smelser. Sing setuju untuk melihat, bahwa keberadaan konflik tidak mempersyaratkan keberadaan tindakan kolektif. Artinya

tidak semua tindakan kolektif senantiasa mengarah terjadinya konflik. Misal tindakan yang berorientasi pada nilai, tindakan yang terinstitutionalisasi, dan tindakan kolektif konvensional yang dapat dilihat dalam bentuk kelompok partisipasi pada acara seremonial, festival, ritual, dan lain-lain (Sing, Rajendra, *Op.Cit.:* 21).

Sing adalah seorang sosiolog yang menstudi tindakan kolektif yang bersifat konfliktual dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan nilai tertentu. Sing juga setuju pendapat Smelser, bahwa perilaku kolektif itu tidak merujuk pada keseragaman, tetapi merujuk pada *class of phenomenon* (*Ibid.*).

Banyak istilah yang pengertiannya serupa dengan perilaku kolektif. Blumer menyebutnya sebagai *class of phenomena*. Seorang psikolog bernama Brown menyebutnya sebagai *mass phenomena*. Lang dan Lang menyebutnya sebagai *collective dynamics* (Smelser, *Op.Cit.:* 21). Istilah lain yang merupakan bagian dari jenis perilaku kolektif misalnya adalah *collective outburst's* dan *collective movement's*. Ledakan kolektif itu merujuk pada bentuk panik, *crazes*, dan ledakan permusuhan yang mana umumnya (tetapi tidak selalu) bersifat eksplosif. Sedangkan gerakan kolektif itu merujuk pada usaha kolektif untuk memodifikasi norma-norma dan nilai-nilai yang mana umumnya (tetapi tidak selalu) berlangsung dalam waktu yang lama. Ada juga yang memberi pengertian gerakan kolektif sebagai perilaku dua orang atau lebih yang mana mereka bertindak secara bersama atau secara kolektif demi kepentingan seluruh kehidupan kelompok (*Ibid.*).

Blumer membagi gerakan sosial menjadi tiga, yakni gerakan sosial umum, gerakan sosial khusus dan gerakan sosial ekspresive. Blumer mengikuti pemikiran Dawson dan Gettys tentang empat tingkat perkembangan gerakan sosial, yakni *social unrest*, *populer excitement*, *formalization*, dan *institutionalization* (*Ibid.*).

Blumer menyetengahkan tentang mekanisme gerakan sosial yang meliputi: agitasi, pengembangan *esprit de corps*, formasi ideologi, pengembangan nilai tertentu, dan pengembangan taktik untuk bertindak. Menurut Blumer, *Esprit de corps* merupakan alat yang penting untuk mengembangkan solidaritas sehingga nantinya dapat memberikan soliditas pada gerakan. *Esprit de Corp* ini dapat dikembangkan melalui: a) pengembangan *the in group- out group relation*, b) pengembangan formasi asosiasi persahabatan informal, dan c) pengembangan partisipasi di dalam acara seremonial formal (*Ibid.*: 22).

Lang dan Lang mengatakan bahwa pemikiran atau gagasan gerakan adalah sebagai sesuatu yang tidak terorganisir akan menghadapkannya pada masalah struktural yang harus dipecahkannya, jika gerakan itu masih ingin tetap bertahan. Adapun beberapa masalah struktural yang sering ada adalah:

- a) Regulasi antara pemimpin dan pengikut,
- b) Pengembangan tipe kepemimpinan yang tepat,
- c) Penentuan hierarki pemimpin dan fungsionaris,
- d) Pengorganisasian staf,
- e) Koordinasi hubungan diantara aneka kelompok yang ada dalam gerakan,
- f) Pengaturan kriteria bagi anggota penuh di dalam kelompok inti, termasuk di dalamnya tugas dan kewajiban keanggotaannya,
- g) Koordinasi aktivitas gerakan di dalam kesepakatannya dengan kelompok lain dan orang luar yakni yang berkaitan dengan pengembangan dan eksekusi strategi dan taktik (Lang dan Lang:1961 dalam Genevie: 1977).

Menurut Lang dan Lang dikatakan, bahwa sangat sulit untuk mengetahui kapan suatu gerakan sosial itu dimulai. Namun, secara

umum dapat dikatakan, bahwa mulainya adalah ketika mulai muncul inisiator gerakan yang menawarkan ide-ide gerakan. Inisiator itu yang nantinya menjadi pemimpin dalam gerakan itu (*Ibid.*).

Zanden (*Ibid.*) mengatakan bahwa kriteria umum dari gerakan sosial adalah bahwa ia bertujuan untuk membawa perubahan di dalam tatanan sosial, khususnya yang berkaitan dengan dasar institusi properti dan hubungan ketenagakerjaan. Zanden dan Heberle memberikan kriteria gerakan sosial sebagai berikut:

- a) bertujuan membawa perubahan fundamental terhadap tatanan sosial, khususnya dalam insitusi dasar properti dan hubungan ketenagakerjaan,
- b) suatu kesadaran tentang identitas dan solidaritas kelompok adalah diperlukan bersamaan dengan kesadaran *common sentiments* dan tujuan.
- c) gerakan sosial selalu terintegrasi dengan serangkaian ide atau ideologi.
- d) gerakan sosial berisi anggota-anggota kelompok yang secara formal diorganisasikan, tetapi gerakan sosialnya itu sendiri adalah bukan kelompok yang terorganisir,
- e) Memiliki aturan yang cukup kuat untuk meneruskan eksistensinya, meski mereka harus merubah komposisi keanggotaanya,
- f) Gerakan sosial bukan suatu produk, tetapi memiliki durasi.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa aksi atau tindakan kolektif itu diawali dari sekelompok orang yang berkumpul, kemudian mereka melakukan aksi atau tindakan secara bersama-sama. Tempat berkumpul dimaksud dapat berupa: kelompok, asosiasi, organisasi, institusi, jaringan dan semacamnya yang sudah *well defined* atau tempat-tempat di luar kategori semua itu (*Ibid.*: 24).

D. Gerakan Sosial di Umbul Wadon Perspektif Neil J. Smelser dan Charles Tilly

Penulis dalam melakukan studi mengenai dinamika gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon menggunakan dua teori. Yang pertama *theory of collective behaviour* dari Neil J. Smelser, yaitu terkait dengan kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, di antaranya: *structural conduciveness*--beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, *structural strain*--yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur, *generalized belief: share interpretation of event*, *precipitating factors*--ada kejadian pemicu (*triggering incidence*), *mobilization for actions*--adanya mobilisasi massa, *operation of social control*--akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik akan sangat cocok untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial masyarakat sekitar Umbul Wadon.

Yang kedua adalah *the main determinants of collective action* dari Charles Tilly yang mengintrodusir lima komponen mobilisasi, yaitu kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang, dan tindakan kolektif itu sendiri.

Teori yang digunakan penulis untuk menganalisa fenomena gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon adalah teori Neil J. Smelser, yaitu mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, di antaranya: *structural conduciveness*--beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, *structural strain*--yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur, misalnya, antar pendukung kontestan pilkada, *generalized beliefs--share interpretation of event*, *precipitating factors*--ada kejadian pemicu (*triggering incidence*), *mobilization for actions*--adanya mobilisasi massa, *failure of social control*--akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada Teori Neil J Smelser bahwa fenomena gerakan masyarakat Umbul Wadon timbul karena ada ketegangan dalam masyarakat, yaitu pada tahun 1998 adanya eksploitasi mata air Umbul Wadon oleh PDAM Sleman yang tidak dikomunikasikan dengan masyarakat. Sedangkan tahun 2003, pemicu adanya gerakan sosial adalah adanya kecurangan dari PDAM Sleman dan PD Argajasa yang mengambil jatah air secara berlebihan sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam AMDAL.

Munculnya perilaku kolektif pada masyarakat sekitar Umbul Wadon juga didukung oleh struktur masyarakat Jawa yang masih kental dengan gotong-royong dan kebersamaan. Dalam kasus Umbul Wadon masyarakat didorong oleh keinginan untuk memperoleh hak yang sama atas sumber daya air. Dengan persamaan kepentingan tujuan, maka masyarakat secara alamiah menggabungkan diri dalam sebuah kelompok untuk melakukan aksi kolektif. Pada tahun 1998, aksi kolektif dilakukan dengan cara berdemonstrasi ke Gedung DPRD Sleman, sedangkan pada tahun 2004 aksi melalui kampanye media.

Mobilisasi massa dilakukan oleh kelompok tertentu, yaitu Komunitas Rakyat Lereng Merapi yang sebagian anggotanya adalah dari masyarakat Umbulharjo. Masyarakat dikumpulkan dalam sebuah musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Salah satu cara yang ditepuh oleh masyarakat adalah melakukan gerakan sosial, yaitu diawali dengan berdemonstrasi secara damai, baru kemudian melakukan advokasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang konkrit dan memihak pada kepentingan rakyat.

Gerakan masyarakat Umbul Wadon juga terjadi karena pemerintah sebagai agen yang melayani masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik. Gerakan masyarakat tahun 1998 diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang mengeksploitasi mata air Umbul Wadon tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat. Sedangkan

pada tahun 2003, yang seharusnya pemerintah mengontrol implementasi kebijakan AMDAL, namun pada kenyataannya tidak demikian, yaitu terjadi kecurangan dari PDAM Sleman sehingga merugikan masyarakat.

Charles Tilly yang mengembangkan model mobilisasi dalam tindakan kolektif mengatakan bahwa, *the main determinants* dari mobilisasi kelompok itu meliputi: organisasi, interes, peluang atau ancaman, dan kemampuan kelompok dalam menyikapi represi atau fasilitas.

Dalam kasus Umbul Wadon, analisis berdasarkan Teori Tilly yaitu masyarakat melakukan aksi kolektif karena adanya kepentingan bersama, yaitu untuk memperoleh hak atas sumber daya air Umbul Wadon. Dalam melakukan aksinya masyarakat membentuk organisasi KRLM (Komite Rakyat Lereng Merapi) pada tahun 1998 dan tahun 2004 masyarakat menunjuk perwakilan dari mereka untuk bergabung dalam tim tujuh dalam menyelesaikan masalah Umbul Wadon. Dalam melakukan aksi tersebut masyarakat mempunyai peluang dan mendapatkan ancaman, baik secara internal maupun secara eksternal. []

BAB III

UMBUL WADON: SUMBER DAYA, DEMOGRAFI, DAN SISTEM SOSIAL

A. Sumber Mata Air Umbul Wadon

Lereng selatan Merapi mempunyai beberapa sumber mata air besar, dua di antaranya dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air bersih, yakni Umbul Bebeng dan Umbul Kali Kuning. Keduanya mempunyai dua pasang sumber mata air, masyarakat setempat menyebutnya Umbul Lanang (mata air laki-laki) dan Umbul Wadon (mata air perempuan). Umbul Bebeng terletak kurang lebih 3 km di atas Umbul Kali Kuning. Air dari Umbul Lanang Bebeng didistribusikan dan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih tidak hanya untuk sebagian warga Cangkringan (Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo), namun alirannya mencapai daerah Klamong Kabupaten Klaten. Sedangkan Umbul Wadon Bebeng memiliki aliran air yang kecil sehingga dibiarkan mengalir di sungai begitu saja.

Sebaliknya, dengan Umbul Kali Kuning, Umbul Wadon memiliki debit air lebih besar daripada Umbul Lanang. Umbul Wadon Kali

Kuning dimanfaatkan tidak hanya untuk masyarakat Umbulharjo yang kebetulan letaknya memang berbatasan dengan desa tersebut, namun juga digunakan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sleman dan Kotamadya Yogyakarta. Menurut data Dinas P3BA Sleman, dari 108 mata air yang berada di Sleman hanya mata air Umbul Wadon Kali Kuning inilah yang potensial untuk dialirkan dengan menggunakan teknik gravitasi dan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Yogyakarta. Karena ketenarannya, masyarakat umum lebih mengenal Umbul Wadon dan Umbul Lanang Kali Kuning daripada Umbul Wadon dan Umbul Lanang Bebeng, dan cenderung menyebut Umbul Kali Kuning dengan sebutan Umbul Wadon dan Umbul Lanang saja.

Umbul Wadon terletak di lembah Kali Kuning, tepatnya di hutan lereng selatan Merapi dengan ketinggian 874 Mdpl. Kawasanya berbatasan langsung dengan Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan hulu Kali Kuning sendiri terletak di ketinggian 1250 Mdpl dan masuk dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Opak--masyarakat menyebutnya dengan nama *Pethit* (Jawa: ujung) Opak.

Aliran airnya melewati Kecamatan Cangkringan, Hargobinangun, Pakem (yang ke arah Barat), dan Kecamatan Ngemplak (yang ke arah Timur). Lingkungan alam disekitar *Kali Kuning* termasuk dalam kategori hutan pegunungan tropis (*mountain tropical forest*) dengan dominasi tumbuhan pinus dan sebagian lagi adalah Puspa, Rasamala dan Sarangan serta mempunyai beberapa kakayaan keanekaragaman hayati seperti Bunga Kantung Semar, Pohon Kina, dan Burung Elang Jawa (Hartanto, "Membangun Kolaborasi Hulu-hilir: Pelajaran dari Umbul Wadon," 2004).

Umbul Lanang memancarkan rekahan lapisan tanah di Lereng sisi barat sungai, sedangkan Umbul Wadon mengeluarkan airnya

dari dasar lembah sungai tepat di bawah lereng sisi timur. Untuk melindungi mataair Umbul Wadon dari bahaya tanah longsor, dibuat bangunan permanen di atas mata air yang telah dibangun sejak jaman Belanda. Namun kedekatannya dengan lokasi bumi perkemahan Kali Kuning ($\pm 500\text{m}$ dari mata air) membuahakan bahaya lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu pencemaran mata air dan air sungai dengan sampah tidak terurai dan berbagai macam limbah kimia seperti sabun dan shampo yang digunakan pengunjung bumi perkemahan.



Gb.1. Umbul Wadon

Saat ini sumber mata air di Kali Kuning hanya tinggal Umbul Wadon, karena Umbul Lanang tidak lagi memancarkan airnya. Pada pengukuran Oktober 1999, debit air Umbul Lanang sebesar 20lt/det. Sedangkan debit air limpuhan dari kedua mata air tersebut (Umbul Lanang dan Umbul Wadon) besarnya bervariasi. Karena apabila musim penghujan datang, maka air akan bertambah banyak dengan adanya curahan air hujan, yaitu sebesar 415,46 lt/dtk dan 319,64lt/dtk. Setelah Umbul Lanang mati, maka satu-satunya sumber mata air adalah Umbul Wadon.

B. Demografi

Jumlah penduduk di Desa Umbulharjo kepadatan tahun 2007 tercatat 3626 jiwa, terdiri atas 1813 jiwa laki-laki dan 1813 jiwa perempuan. Luas desa tersebut 8,26 km². Apabila dihitung kepadatan penduduknya ada 439 jiwa/km². Jumlah penduduk di Desa Umbul Harjo sebanyak 3626 jiwa, bila dilihat per dusun sebarannya bervariasi. Dusun yang terbanyak penduduknya terlihat pada Dusun Pangukrejo tercatat 19,56%, berikutnya Dusun Gondang tercatat 13,38%, Dusun Balong tercatat 12,30% dan Dusun Gambretan tercatat 12,16%.

Konsentrasi penduduk di Desa Umbulharjo pada umumnya mengikuti jalur jalan dan aliran sungai. Dengan mengetahui jumlah penduduk dapat diperkirakan volume air bersih yang digunakan penduduk pada suatu daerah. Prediksi volume air dapat diketahui, apabila rata-rata banyaknya air oleh penduduk per kapita diketahui. Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk dapat dipergunakan untuk memprediksi jumlah volume air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Tabel. III.1. Jumlah Penduduk Desa Umbulharjo

No	Dusun	Jumlah(Jiwa)	Persentase
1	Pelemsari	222	6,12
2	Pangukrejo	528	14,56
3	Gondang	485	13,38
4	Gumbritan	441	12,16
5	Balong	446	12,30
6	Plosorejo	357	9,85
7	Karanggeneng	394	10,87
8	Sambisari	429	11,83
9	Petingsari	324	8,94
	Jumlah	3626	100

Sumber : Profil Desa Umbulharjo

Jumlah penduduk di sekitar jaringan pipa air minum dan tempat penimbunan air tercatat 355.016 jiwa, yang tersebar pada enam kecamatan, yaitu Kecamatan Pakem, Ngaglik, Ngemplak, Depok, Sleman, Mlati. Bila ditinjau sebarannya, ternyata Kecamatan Depok mempunyai penduduk terbanyak, yaitu 102.000 jiwa. Berikutnya Kecamatan Mlati tercatat 63.679 jiwa, Ngaglik 62.271 jiwa dan Sleman 53.722 jiwa.

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Penduduk akan bertambah jumlahnya apabila ada penduduk yang lahir dan datang; jumlah penduduk akan berkurang apabila ada yang meninggal dan meninggalkan daerah tersebut. Berdasarkan data Desa Umbulharjo pada tahun 2001 sebanyak 3189 jiwa, pada tahun 2007 menjadi 3626 jiwa. Jadi, selama waktu enam tahun pertambahan penduduknya sebanyak 437 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Umbulharjo per tahun dari tahun 2001-2007 adalah 2,11%. Apabila ditinjau pertumbuhan penduduknya selama enam tahun 437 jiwa berarti pertambahan penduduk di daerah tersebut setiap tahunnya sebesar 73 Jiwa. Pertambahan jumlah sebesar ini juga akan meningkatkan jumlah penggunaan air bersih di Desa Umbulharjo.

Tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah disekitar jaringan transmisi air bersih dan distribusi induk nampak bervariasi. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi terlihat di Kecamatan Ngaglik dan Mlati masing-masing 1,61%. Berikutnya terlihat pada Kecamatan Ngemplak tercatat 1,15%. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan distribusi untuk secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.2. Pertumbuhan Penduduk di Sekitar Jaringan Transmisi Air Bersih dan Distribusi Induk

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertumbuhan (%)
		2006	2007	
1	Pakem	29.357	29.752	0,69
2	Ngaglik	60.316	62.271	1,61
3	Ngemplak	41.650	42.614	1,15
4	Depok	98.967	102.978	1,50
5	Sleman	52.756	53.722	0,92
6	Mlati	61.696	63.679	1,61

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Sleman, 2006 dan 2007 dan hasil perhitungan

Pertumbuhan penduduk yang bervariasi di wilayah sekitar jaringan transmisi air bersih dan distribusi induk dapat mengakibatkan meningkatkan pemanfaatan air bersih.

Komposisi penduduk adalah gambaran susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan-pengelompokan penduduk menurut karakteristik- karakteristik yang sama, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan , lapangan pekerjaan, pendidikan, agama dan menurut umur.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan salah satu variabel penting di dalam demografi. Komposisi penduduk menurut umur merupakan daya dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan; seperti merencanakan pelaksanaan wajib belajar, memperkirakan besarnya tingkat kelahiran, kematian dan rasio beban tanggungan.

Struktur umur penduduk Desa Umbulharjo tergolong usia muda tercatat 22,2%, dewasa tercatat 68,04% dan tua tercatat 9,76%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur umur penduduk menurut umur di Desa Umbulharjo tergolong usia muda. Untuk

mengetahui komposisi penduduk menurut umur secara lengkap dapat diperiksa pada tabel berikut:

Tabel III.3.
Komposisi Penduduk Menurut Umur di Desa Umbulharjo tahun 2007

NO	Golongan Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	0-4	207	5,71
2	5-6	108	2,98
3	7-12	271	7,47
4	13-15	219	6,04
5	16-18	235	6,48
6	19-25	308	8,49
7	26-35	406	11,20
8	36-45	500	13,20
9	46-50	386	13,79
10	51-60	492	10,64
11	61-65	140	13,57
12	66-75	162	3,86
13	>75	192	4,47
	Jumlah	3626	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo, 2007

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa komposisi penduduk menurut umur dapat untuk memprediksi rasio beban tanggungan. Untuk mencari rasio beban tanggungan, penduduk digolongkan menjadi tiga menurut produktivitasnya, yaitu:

1. Golongan penduduk yang berumur 0-15 tahun merupakan penduduk yang belum produktif secara ekonomis.
2. Golongan penduduk yang berumur 15-65 tahun merupakan penduduk yang produktif.
3. Golongan penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun merupakan penduduk yang tidak produktif lagi

Semakin banyak beban tanggungan penduduk usia produktif dalam satu keluarga semakin banyak pula biaya yang diinvestasikan

pada kebutuhan anggota keluarga seperti pangan, pakaian, pendidikan bahkan air, kalau keluarga tersebut berlangganan air dari perusahaan air minum (PAM).

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat mencerminkan aktivitas atau usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengetahui komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat untuk memprediksi kebutuhan air bersih tiap jenis aktivitas atau setiap kegiatan. Mayoritas penduduk Umbulharjo bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebutuhan air bersih di daerah tersebut banyak terserap oleh petani dan aktivitasnya.

Matapencaharian penduduk Desa Umbulharjo sangat bervariasi. Matapencaharian penduduk daerah tersebut yang terbanyak adalah petani dan peternak tercatat 84,66%. Hal ini sesuai dengan kondisi geografisnya didominasi lahan pertanian dan tingkat ekonominya masih bersifat agraris.

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk Desa Umbulharjo yang lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.III.4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan

NO	Jenis Matapencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Karyawan		
	a. Pegawai Negeri Sipil	96	4,13
	b. ABRI	6	0,26
	c. Swasta	118	5,07
2	Wiraswasta/Pedagang	57	2,45
3	Tani	1970	86,66
4	Pertukangan	42	1,80
5	Buruh Tani	4	0,17
6	Pensiunan	34	1,46
	Jumlah	2327	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo 2007

Penduduk di Desa Umbulharjo bila ditinjau dari komposisi agama, ternyata mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam pada daerah tersebut tercatat 96,72%. Penduduk beragama Kristen menempati urutan berikutnya tercatat 2,09%, Katolik tercatat 1,19%. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut agama di Desa Umbulharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5. Komposisi Penduduk Menurut Agama Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan

NO	Agama	Jumlah (Jiwa)	Peresentase
1	Islam	3478	96,72
2	Kristen	75	2,09
3	Katolik	43	1,19
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	3596	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo

Komposisi penduduk menurut agama di Desa Umbulharjo dapat mencerminkan penggunaan air bersih. Sebagai contoh, umat Islam menggunakan air untuk wudhu sebelum melakukan shalat.

Pada taraf tertentu, pendidikan diharapkan secara pribadi mampu meningkatkan status sosial dan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dikelola oleh lembaga formal.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Umbulharjo yang terbanyak adalah tamat Sekolah Dasar (SD) tercatat 71,22%. Berikutnya penduduk yang belum sekolah tercatat 8,40%, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tercatat 5,98% dan tidak tamat sekolah dasar tercatat 5,03%. Untuk mengetahui komposisi tingkat pendidikan penduduk Desa Umbulharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.III.6.Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Buta Aksara dan Angka	28	0,78
2	Belum Sekolah	302	8,40
3	Tidak Tamat SD	181	5,03
4	Tamat SD	2561	71,22
5	Tamat SLTP	215	5,98
6	Tamat SLTA	273	7,59
7	Tamat Akademi (D1-D3)	28	0,78
8	Sarjana (S1-S2)	8	0,22
	Jumlah	3596	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo tahun 2007

Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan relatif rendah pada umumnya mempunyai kesempatan kerja relatif sempit. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya relatif kecil. Untuk mencukupi kebutuhannya mereka biasanya melakukan kerja sambilan di sekitar tempat tinggalnya.

C. Perekonomian Lokal

Aktivitas ekonomi penduduk Umbulharjo dapat dilihat pada komposisi penduduk menurut mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk mencerminkan aktivitas pada suatu daerah. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Umbulharjo menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi matapencaharian di daerah tersebut tercatat 84,66%. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan rakyat.

Ditinjau dari segi luas pemilikan lahan pertanian di Desa Umbulharjo, petani memiliki lahan pertanian relatif sempit, mayoritas kurang dari 0,6 Ha. Jumlah petani yang memiliki lahan kurang dari 0,1 Ha tercatat 17,31% dan yang memiliki lahan antara 0,1-0,5 Ha tercatat 37,54%. Untuk mengetahui luas pemilikan

lahan penduduk Desa Umbulharjo secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel.III.7.Luas Pemilikan Lahan Pertanian Penduduk Desa Umbulharjo Tahun 2007

No	Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	<0,1	107	17,31
2	0,1-0,5	232	37,54
3	0,6-1	96	15,53
4	1,1-1,5	127	20,55
5	1,6-2,9	39	6,31
6	3,0-5,9	16	2,59
7	6,0-8,9	-	-
8	9,0-10	1	0,16
Jumlah		618	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo 2007

Data tersebut menunjukkan bahwa pemilikan lahan pertanian di daerah tersebut relatif sempit. Selanjutnya pemilikan lahan akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Semakin sempit luas pemilikan lahan pertanian, semakin sedikit pendapatan yang diterima dari sektor pertanian. Pendapatan yang diterima dari sektor pertanian yang sedikit, akan berakibat pada ketidacukupan untuk hidup sehari-hari. Untuk mencukupinya, penduduk di daerah tersebut memelihara ternak.

Aktivitas penduduk Desa Umbulharjo bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Tanaman perkebunan yang luas penennya relatif luas meliputi tanaman kopi tercatat 84 hektar, cengkeh tercatat 19 hektar, dan kelapa tercatat 12 hektar, luas panen tanaman perkebunan di Desa Umbulharjo secara rinci dilihat pada tabel berikut:

Tabel.III.8. Luas Panen Tanaman Perkebunan Desa Umbulharjo tahun 2007

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)
1	Kelapa	12
2	Kopi	84
3	Tebu	0,5
4	Coklat	0,25
5	Cengkeh	19

Sumber : Profil Desa Umbulharjo tahun 2007.

Sektor pertanian didukung salah satunya terlihat pada luas panen padi, palawija, dan sayur-sayuran. Luas panen padi tercatat 23 hektar, jagung 10 hektar, ketela pohon tercatat 7 hektar, luas panen sayur-sayuran yang relatif luas, yaitu tercatat cabe 5 hektar, buncis 3 hektar, sawi 2 hektar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.III.9. Luas Panen Padi, Palawija, Sayuran Di Desa Umbulharjo

No	Jenis Tanaman	Luas Panen
1	Padi	23
2	Jagung	10
3	Ketela Pohon	7
4	Kacang Sawah	1
5	Ketela Rambat	0,5
6	Kubis (Kol)	0,5
7	Kentang	0,5
8	Sawi	2
9	Tomat	1,5
10	Kacang Panjang	1
11	Terong	0,25
12	Buncis	3
13	Lombok	3

Sumber : Profil Desa Umbulharjo 2007

Ternak yang dipelihara penduduk Desa Umbulharjo meliputi sapi, yakni jenis sapi perah, kambing, ayam, kuda, babi, itik, dan domba. Untuk mengetahui jumlah pemilik ternak di Desa Umbulharjo dapat dilihat pada tabel berikut, Pemilik ternak sapi/sapi perah sebanyak 37,95% berikutnya pemilik ternak ayam tercatat 36,66% pemilik ternak kambing tercatat 23,82%. Hasil wawancara dengan peternak sapi perah yang jumlahnya 3 ekor dapat menerima penghasilan bersih sebanyak Rp 20.000 per hari. Dengan memelihara ternak diharapkan dapat menambah pendapatan.

Tabel. III.10. Jumlah Pemilik Ternak Di Desa Umbulharjo

No	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	%
1	Sapi/sapi perah	411	37,95
2	Kambing	258	23,82
3	Ayam	397	36,66
4	Kuda	2	0,18
5	Babi	1	0,02
6	Itik	12	1,11
7	Domba	2	0,18
	Jumlah	1083	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo tahun 2007.

Aktivitas ekonomi penduduk Desa Umbulharjo tidak terbatas pada sektor pertanian dan peternak tetapi juga merambah sektor lainnya. Sektor tersebut meliputi perikanan, industri, pedagang/wiraswasta, pertukangan, karyawan, buruh tani dan pensiunan. Jumlah masing-masing sektor secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel.III.11. Aktivitas Ekonomi Penduduk Desa Umbulharjo
Lainnya tahun 2007**

No	Jenis Aktivitas Ekonomi	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Karyawan		
	a.Pegawai Negeri Sipil	96	21,72
	b.ABRI	6	1,36
	c.Swasta	118	26,70
2	Wiraswasta/Pedagang	57	12,90
3	Pertukangan	42	9,50
4	Buruh Tani	4	0,90
5	Pensiunan	34	7,69
6	Perikanan	7	1,58
7	Buruh ternak	15	3,39
8	Industri Kecil/ RT	63	14,25
	Jumlah	442	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo tahun 2007.

Aktivitas ekonomi lainnya selain pertanian dan peternakan di Desa Umbulharjo yang terbanyak adalah karyawan swasta tercatat 26,70%.

Berikutnya Pegawai Negeri Sipil tercatat 21,72%, industri kecil/rumah tangga tercatat 14,25% dan wiraswasta/pedagang 12,90%.

Sub bagian ini membahas pendapatan penduduk Desa Umbulharjo. Pendapatan yang dibahas merupakan pendapatan total. Pendapatan total meliputi pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan penduduk Desa Umbulharjo yang paling banyak antara Rp 6.0000.000-Rp 8.000.0000, tercatat 28,12%. Berikutnya tingkat pendapatan antara Rp 4.000.000,- Rp 6.000.000, tercatat 23,44% dan lebih kecil dari Rp 2.000.000, tercatat 21,88%. Untuk mengetahui tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel .III.12. Tingkat Pendapatan Penduduk Desa Umbulharjo

No	Tingkat Pendapatan (Rp000)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	<2000	14	21,88
2	2000-4000	10	15,62
3	4000-6000	15	23,44
4	6000-8000	18	28,12
5	>8000	7	10,94
	Jumlah	64	100

Sumber: Profil Desa Umbulharjo tahun 2007

Dari perhitungan di atas, diperoleh batasan standar kebutuhan hidup minimum perkapita per tahun di Desa Umbujlharjo sebesar Rp 570.500,-. Kalau jumlah kepala keluarga di daerah tersebut sebanyak 922 jiwa dengan jumlah penduduk sebesar 3626 jiwa maka rata-rata satu keluarga terdiri atas empat jiwa. Jadi pendapatan perkapita satu keluarga sebanyak Rp 2.282.000,- per tahun.

D. Nilai Budaya dan Adat Istiadat

Kebudayaan atau adat istiadat adalah suatu budaya atau tradisi yang dilakukan oleh penduduk dan sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya. Kebudayaan yang ada di Desa Umbulharjo merupakan kebudayaan jawa. Karena daerah tersebut merupakan daerah pedesaan, maka kebudayaan ada yang berkaitan dengan pertanian. Kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Desa Umbulharjo meliputi:

1. Perkawinan adat;
2. Upacara Kelahiran;
3. Upacara Kematian;
4. Upacara Adat “dandan kali”
5. Upacara Adat Dalam Kegiatan Peternakan;
6. Labuhan di Puncak Gunung Merapi.

E. Kelembagaan dalam Masyarakat

Kelembagaan dalam masyarakat yang ada di Desa Umbulharjo pada umumnya berkaitan dengan pemerintah setempat. Lembaga tersebut pada umumnya membantu kelancaran program pembangunan yang ada di daerah tersebut. Sebagai contoh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) membantu merencanakan pembangunan bangunan fisik, sosial, dan ekonomi. Namun demikian juga ada lembaga masyarakat yang tidak berkaitan dengan pemerintah setempat seperti Majelis Taklim, Remaja Masjid. Lembaga masyarakat yang ada di daerah tersebut 8 buah. Untuk lebih jelasnya dapat diperiksa pada tabel berikut:

Tabel III.13. Jumlah Lembaga Masyarakat di Desa Umbulharjo

NO	Jenis Lembaga	Anggota (orang)
1	LKMD	40
2	LMD	13
3	Kader Pembangunan Desa (KPD0	45
4	Karang Taruna	100
5	Dasa Wisma	9
6	Majelis Taklim	100
7	Remaja Masjid	120
8	PKK	-
	a. Tim Penggerak PKK	23
	b. Kader PKK	36

Sumber: Profil Desa Umbulharjo tahun 2007.

Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi antar warga masyarakat Desa Umbulharjo.

F. Struktur dan Stratifikasi Sosial

Umbulharjo adalah suatu sistem sosial yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal. Sebagai sistem yang patrilineal, maka jenis kelamin laki-laki istimewa yang sudah berumah tangga dan akan dianggap sebagai representasi dari struktur sosial yang ada. Wanita atau khususnya isteri dengan demikian akan menjadi

bagian dari struktur laki-laki atau suaminya. Setiap manusia yang menjadi bagian atau anggota dari sistem kekerabatan secara sosial akan memiliki seperangkat nilai, norma, serta sistem kepribadian sosial lain di dalam dirinya. Konsekuensi dari fenomena semacam ini adalah adanya sistem kepercayaan sosial, bahwa laki-laki dan atau pun suami akan menempati struktur sebagai *social pattern*, sebab mereka dianggap sebagai representasi dari struktur sosial itu sendiri. Laki-laki atau suami juga merupakan representasi dari struktur sosial masyarakatnya. Mereka menjadi pedoman tindak masyarakat umum. Dalam gerakan masyarakat memperjuangkan hak atas air laki-laki mengambil peranan yang lebih dominan daripada perempuan atau istri.

Stratifikasi sosial masih didominasi oleh tiga dimensi utama, yaitu kekuasaan, *privilege*, dan prestise. Kekuasaan di Desa Umbulharjo tidak terpusat pada kepala desa (berdasarkan struktur pemerintahannya), melainkan kekuasaan terletak pada anggota masyarakat yang mempunyai keberanian dan inisiatif dalam melakukan gerakan masyarakat.

Dalam hal gerakan masyarakat Umbul Wadon, inisiatif untuk melakukan gerakan bukan datang dari kepala desa, melainkan datang dari sekelompok anggota masyarakat. Kepala Desa hanya berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah kabupaten. Pendampingan dan fasilitator bagi masyarakat dalam melakukan gerakan tidak dilakukan oleh pemerintah desa melainkan dilakukan oleh LSM.

Mengapa kepala desa tidak menjadi orang yang mempunyai kekuasaan penuh? Penulis melihat bahwa peran dari kepala desa Umbulharjo hanya berperan secara struktur pemerintahan. Hal ini menurut hasil dari penelitian dipengaruhi oleh karakteristik dari masyarakat Umbulharjo. Selain itu, bagi masyarakat Umbulharjo, kepala desa bukanlah jabatan yang musti diperebutkan. Hal ini

terlihat dari kepala desa yang saat ini menjabat sudah menjabat hingga dua periode. Pemilihan kepala desa pun bukan pesta demokrasi yang ramai dengan banyak tokoh yang menjadi alternatif pilihan masyarakat. []

BAB IV

AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT UMBUL WADON: DARI KRITIK HINGGA NEGOSIASI

A. Pengantar

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses masyarakat sekitar Umbul Wadon menggabungkan diri dalam melakukan aksi kolektif. Baik aksi kolektif pada tahun 1998 maupun aksi kolektif tahun 2004. Yang dimaksudkan dengan proses ini adalah proses bagaimana berbagai faktor sebagaimana dimaksud di atas itu saling mempengaruhi bagi terbentuknya perilaku kolektif dan proses aktor gerakan masyarakat menggabungkan diri sehingga terjadi aksi kolektif.

Berkaitan dengan persoalan proses masyarakat menggabungkan diri dalam aksi kolektif, data lapangan di samping didapat dari subjek penelitian para aktor gerakan sebagai sumber utama, juga akan ditambahkan data yang digali dari pemerintah desa Umbulharjo, masyarakat Umbulharjo secara acak dan LSM yang mendampingi masyarakat sebagai upaya mendapatkan informasi yang mendalam dan berimbang.

Gerakan masyarakat Umbulharjo dalam memperjuangkan hak atas air dimulai pada saat PDAM Sleman mulai membangun proyek untuk memanfaatkan mata air Umbul Wadon pada tahun 1997. Pada waktu itu, masyarakat resah dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk mencari solusi, hasilnya adalah aksi kolektif masyarakat pada tahun 1998. Hasil dari aksi kolektif tersebut adalah dilakukan negosiasi dan menghasilkan AMDAL sebagai pedoman yang mengatur pemanfaatan mata air Umbul Wadon tahun 2000. Tahun 2000-2003 masyarakat didampingi LSM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan ditemukan adanya kecurangan. Akhirnya masyarakat yang didampingi LSM melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk mencari solusi. Pada akhirnya konflik meout kembali dan masyarakat melakukan protes dengan advokasi melalui media massa.

B. Awal Mula Pemerintah Memanfaatkan Mata Air Umbul Wadon

Pemerintah Kabupaten Sleman juga ingin memanfaatkan Umbul Wadon untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Sleman, lalu dibuatlah studi kelayakan. Pada tanggal 29 November 1996 Bupati Sleman Drs.Arifin Ilyas mengirim surat kepada Gubenur Daerah Istimewa, Nomor 690/06254/1996, perihal izin Pemanfaatan Mata Air Umbul Wadon di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan. Berdasarkan surat Bupati tersebut maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 690/0935, perihal izin pemanfaatan air dari mata air Umbul Wadon di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan pada tanggal 28 April 1997 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs.Suprastowo atas nama Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi surat jawaban itu adalah menyetujui permohonan Bupati Sleman.

Untuk mendanai proyek air bersih tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat pinjaman dari Rekening Pembangunan Daerah (RPD) Departemen RI sesuai dengan perjanjian pinjaman No: RDA-269/DP3/1997 tanggal 5 Mei 1997, nilai pinjaman sebesar Rp.8.000.000.000,-, dengan bunga pinjaman 11,5% per tahun menurun. Jangka waktu pengembalian 17 tahun masa tenggang (periode konstruksi) selama empat tahun sehingga mulai mengembalikan tahun 2001. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Bapak Edi, salah satu pejabat PDAM Sleman:

“Pada mulanya PDAM memanfaatkan air Umbul Wadon, setelah dilakukan uji kelayakan dan setelah mendapatkan izin dari gubbenur Sri Sultan. Untuk membangun pipa-pipa yang menyalurkan air, Pemerintah Daerah Sleman mendapatkan pinjaman dana dari Rekening Pembangunan Daerah”

Wawancara: Pak Edi 30 Agustus 2008 jam 08.05 WIB

Rencana pemanfaatan air bersih tersebut diutamakan bagi perumahan, kantor/lembaga, hotel dan masyarakat umum meliputi perumahan dan permukiman sepanjang Jalan Kaliurang, Kecamatan Depok, Monjali, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kecamatan Sleman / Beran sampai Ring Road Barat, serta Kecamatan Kalasan.

“PDAM Sleman pada waktu itu direncanakan untuk melayani masyarakat yang tinggal di daerah perumahan yang kesulitan untuk mendapatkan air dari sumur”

Wawancara: Pak Edi 30 Agustus 2008 jam 08.05 WIB

Setelah perencanaan selesai, dari uji kelayakan, perolehan izin hingga pinjaman dana maka pembangunan di mulai. Dibangunlah Jaringan Perpipaan Transmisi, Distribusi Induk, Cabang Distribusi dan Tersier mencapai 72 Km tersebar diwilayah Kabupaten Sleman. Ditargetkan pada pertengahan bulan Agustus 1998

pelayanan PDAM Kabupaten Sleman (PDAM Tirta Dharma) dapat berfungsi.

Selain PDAM Sleman, mata air Umbul Wadon juga dimanfaatkan PDAM Tirta Martha dan PD Argajasa /PD. Anindya. Semua perusahaan air minum tersebut tidak mengkomunikasikan dengan masyarakat. Setelah penulis konfirmasi kepada pejabat PDAM Sleman dan PD Argajasa ternyata penyebab tidak ada komunikasi kepada masyarakat karena segala keputusan dan kebijakan langsung berasal dari atas (*top down*) sehingga masyarakat tidak dilibatkan. Seperti yang diungkapkan mereka:

“Proyek tidak ada sosialisasi ke masyarakat, pada saat itu kami hanya menerima perintah dari atas. Saya pikir juga karena saat itu masih zamannya Orde Baru jadi segala sesuatu diputuskan oleh pemerintah”

Wawancara: Pak Edi 30 Agustus 2008 jam 08.05 WIB

“Kami di sini hanya sebagai pelaksana, sedangkan keputusan dari pemerintah propinsi. Untuk komunikasi kepada masyarakat kami tidak diperintahkan jadi kami tidak melakukan sosialisasi”

*Wawancara: Pak Yulianto Subagyo
21 Agustus 2008 jam 09.10 WIB*

Dari jawaban yang diberikan oleh kedua responden tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa jawaban tersebut hanya merupakan sebuah pembelaan semata. Menurut penulis meskipun sebuah program ataupun proyek diputuskan oleh pemerintah dan dilakukan dengan sistem *top down*, hendaknya sebelum pelaksanaan program atau proyek ada sosialisasi ke pemerintah desa dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai pelaksanaan proyek pemanfaatan mata air Umbul Wadon tanpa dikomunikasikan kepada masyarakat merupakan hal yang

sangat fatal. Air merupakan *basic needs* yang tidak dapat disubstitusi oleh barang lainnya. Tanpa air tidak akan ada kehidupan, apalagi letak Desa Umbulharjo di daerah pegunungan yang tidak mungkin menggali sumur dan menggantungkan semua pemenuhan akan kebutuhan air pada air mata air Umbul Wadon. Akar permasalahan adanya gerakan masyarakat memperjuangkan hak atas air Umbul Wadon adalah tidak adanya komunikasi dengan masyarakat dan masyarakat merasa diabaikan kepentingan dan suaranya.

Munculnya gerakan sosial disebabkan oleh, *pertama*, hubungan antara proses *framing* dan suatu pemikiran tentang perubahan politik ‘objektif’ yang memfasilitasi kemunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong mobilisasi tidak hanya melalui pengaruh ‘objektif’ yang diakibatkan oleh perubahan relasi kekuasaan tetapi juga oleh *setting* dalam pergerakan proses framing yang selanjutnya menggerogoti legitimasi sistem.

Kedua, suatu gerakan sosial bisa muncul karena kaitan resiprokal antara proses *framing* dan mobilisasi. Proses *framing* secara jelas mendorong mobilisasi ketika orang-orang berupaya mengorganisasi dan bertindak pada basis kesadaran yang berkembang tentang ketidakabsahan dan kerentanan sistem. Pada saat yang sama, potensi bagi proses framing yang kritis dikondisikan oleh akses orang-orang kepada berbagai struktur mobilisasi. Dan hal ini akan mungkin terjadi dalam kondisi organisasi yang kuat daripada organisasi yang lemah. Dengan kata lain proses *framing* tidak akan terjadi dalam kondisi ketiadaan organisasi, karena ketiadaan struktur mobilisasi hampir pasti akan mencegah penyebaran *framing* ke jumlah minimal orang yang diperlukan untuk basis tindakan kolektif.

Dalam kasus gerakan masyarakat Umbul Wadon peneliti melihat bahwa adanya perubahan politik mengenai kebijakan pemanfaatan air Umbul Wadon yang tidak dikomunikasikan kepada masyarakat. Secara spontan kemudian masyarakat yang

merasa terancam masa depannya dalam memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya melakukan sebuah tindakan untuk melawan kebijakan tersebut dan menuntut ditegakkan keadilan.

Menurut analisa penulis, pendekatan dalam melakukan gerakan, masyarakat sekitar Umbul Wadon termasuk dalam pendekatan Moral Ekonomi. Pendekatan moral ekonomi berasumsi gerakan perlawanan petani semata-mata didasari oleh moralitas tradisional yang berorientasi ke masa lalu dan masa kini saja sehingga ketika terjadi perubahan yang tidak sesuai atau dirasakan mengancam kelangsungan kehidupan yang telah mereka miliki, para petani kemudian mengadakan reaksi sampai ke taraf yang paling ekstrem, yaitu mengadakan perlawanan terbuka. Pendekatan historis memandang nilai, norma, tradisi, kepercayaan, dan mitos yang telah dimiliki dan diwarisi secara turun temurun oleh para petani sebagai sesuatu yang *crucial*. Pendekatan ekonomi politik berasumsi bahwa gerakan perlawanan petani sebenarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual para petani terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan bahkan mengancam mereka. Atau sekurang-kurangnya, perubahan ini dinilai telah menghalang-halangi usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup (dengan demikian pendekatan ini berasumsi bahwa petani juga berorientasi pada masa depan).

C. Proses Terjadinya Aksi Kolektif tahun 1998-2000

Air bagi masyarakat desa sangat vital karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga untuk keperluan mata pencaharian seperti untuk peternakan sapi perah, pengairan ladang dan sawah. Kehidupan masyarakat di lereng Gunung Merapi sangat bergantung pada mata air Umbul Wadon karena di wilayah itu sangat sulit membuat sumur. Selain itu juga dipicu karena matinya sumber-sumber mata air lainnya yang pada zaman dahulu

bias dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Basuki berikut:

“Desa Umbulharjo ini, untuk kebutuhan air sangat tergantung pada mata air Umbul Wadon, karena untuk membuat sumur kami harus menggali tanah hingga ratusan meter. Selain untuk kebutuhan rumah tangga air juga kami perlukan untuk beternak dan bertani”

Wawancara: Pak Basuki, 16 Agustus 2008 jam 13.30 WIB

Pada bulan April 1998 sebagian masyarakat di lereng Gunung Merapi yaitu wilayah Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Ngaglik merasakan kekurangan air walau kadang hujan masih turun. Hal tersebut masih menjadi perbincangan sebagian kecil masyarakat lereng Merapi yang merasakan kekurangan air, maka dicarilah penyebabnya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh sebagian masyarakat ternyata air Umbul Wadon sudah dialirkan lewat pipa-pipa besar berdiameter 16” (40cm). Masyarakat jengkel, marah, menderita, tetapi tidak tahu harus berbuat bagaimana. Beberapa orang berkumpul membicarakan langkah-langkah yang mesti dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bagyo berikut:

“Sekitar bulan April tahun 1998 tiba-tiba air berkurang, di antara kami masyarakat bertanya-tanya, kemudian beberapa warga mencari penyebabnya dan ternyata di mata air Umbul Wadon telah dipasang pipa-pipa besar berdiameter 16”, akhirnya kami berkumpul untuk mencari pemecahan masalahnya”

*Wawancara: Pak Bagyo,
10 agustus 2008 jam 15.43 WIB*

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Sobar dan Pak Bambang, sebagai berikut:

“Pada waktu itu kami benar-benar marah, air yang biasanya mengalir dengan lancar tiba-tiba berkurang. Untuk kebutuhan kami jadi kesulitan, ternyata air sudah dialirkan melalui pipa yang besar berdiameter kira-kira 40- 45cm”

*Wawancara: Pak Sobar,
20 Agustus 2008 jam 11.00 WIB*

“Air kan milik semua, tidak bisa air dieksploitasi oleh pemerintah demi kepentingan bisnis, *lha* bagaimana dengan nasib rakyat. Selain itu mata air juga harus dilakukan konservasi agar tetap lestari sampai anak cucu nanti”

*Wawancara: Pak Bambang,
15 Agustus 2008 jam 08.00 WIB*

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa motif dari dilakukannya aksi kolektif pada tahun 1998 karena masyarakat merasa dikesampingkan haknya dalam akses terhadap sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata Air Umbul Wadon dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal ini PDAM Tirta Dharma, PD. Argajasa/Anindya tanpa adanya komunikasi dan pembagian yang adil dengan rakyat. Atas dasar kepentingan yang sama tersebut, maka masyarakat mulai melakukan perkumpulan- perkumpulan untuk mencari solusi atas masalah tersebut .

Setelah mencari tahu dan melakukan berbagai kajian tentang proyek PDAM tersebut sekaligus melakukan penggalangan massa, masyarakat kemudian membentuk organisasi yang diberi nama Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) yang terdiri dari perwakilan-perwakilan masyarakat Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Ngaglik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Hari:

“Pada waktu itu masyarakat bingung, air kok tiba-tiba sulit, kemudian dicari sebabnya ternyata di Umbul Wadon telah

terpasang pipa-pipa yang baru kemudian diketahui milik PDAM Sleman, kemudian bebrapa masyarakat berkumpul untuk melakukan langkah-langkah memperoleh kembali hak atas ai, kami membentuk organisasi bersama dengan nama Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) untuk mempermudah konsolidasi dan mobilisasi”

Wawancara: Pak Hari 15 Agustus 2008 jam 18.35 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Bambang: “Kami semua berkumpul dan membentuk kelompok dengan nama Komite Rakyat Lereng Merapi” (*Wawancara: Pak Bambang 30 Agustus 2008 jam 09.09 WIB*).

Organisasi yang dibentuk dalam rangkain gerakan masyarakat berfungsi untuk mempermudah koordinasi dan konsolidasi masyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh masyarakat atas dasar latar belakang yang sama dan untuk mencapai tujuan yang sama. Latar belakang yang sama adalah sama-sama merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atas akses sumber daya air Umbul Wadon dan mereka juga merasa terancam kehidupannya dalam hal pemenuhi kebutuhan air yang tidak dapat di substitusi oleh barang lainnya. Tujuan mereka adalah adanya pembagian yang adil antara masyarakat, pemerintah dalam hal penggunaan mata air Umbul Wadon.

Masyarakat melakukan koordinasi untuk segera melakukan aksi bersama ke Gedung DPRD Sleman, agar aspirasi mereka segera di dengar. Semua berjalan alamiah tanpa ada paksaan masyarakat yang bergabung semakin hari semakin bertambah. Tidak ada sosialisasi secara resmi dari organisasi, namun masyarakat yang bergabung atas dasar naluri dan kepentingan yang sama. Berita mengenai akan diadakannya aksi kolektif tersebar dilingkungan masyarakat melalui komunikasi masyarakat yang terjadi secara alamiah (dari mulut ke

mulut). Seperti yang diungkapkan oleh Pak Basuki dan Pak Sobar sebagai berikut:

“Saya dan teman-teman yang lain berkumpul tanpa paksaan, kami berkumpul karena kami rakyat yang sama-sama ditindas, dan untuk memperjuangkan hak atas air”

Wawancara: Pak Basuki, 16 Agustus 2008 jam 13.30 WIB

“Saya bergabung atas kemauan sendiri untuk berjuang demi tercukupi kebutuhan air, dan untuk menjaga kelestarian mata air Umbul Wadon”

Wawancara: Pak Sobar, 20 Agustus 2008 jam 11.00 WIB

Para teoritis gerakan sosial dari berbagai perspektif dan berbagai negara kurang lebih memiliki semacam titik temu bahwa setidaknya ditemukan tiga faktor yang bisa menjelaskan siklus gerakan sosial tersebut.

Kesempatan politik.

Para teoritis gerakan sosial menegaskan pentingnya suatu sistem politik dalam menyediakan kesempatan bagi aksi-aksi kolektif. Teoritis dari Amerika Serikat mencari penjelasan dari kemunculan gerakan sosial tertentu pada basis perubahan-perubahan dalam struktur kelembagaan atau relasi-relasi kekuasaan informal dalam suatu sistem politik nasional. Menyusul kemudian dengan nada sedikit berbeda, teoritis Eropa berusaha menemukan kemunculan gerakan sosial dengan bertolak dari perbedaan-perbedaan dalam struktur, luas, dan keberhasilan gerakan sosial secara komparatif lintas negara pada basis perbedaan dalam karakteristik-karakteristik negara bangsa di mana ke semua itu melekat.

Struktur mobilisasi.

Struktur mobilisasi dapat diartikan sebagai wahana-wahana kolektif, baik formal maupun informal yang dipergunakan oleh orang-orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri dalam aksi kolektif. Wahana-wahana kolektif tersebut bisa berupa kelompok, organisasi dan jaringan informal yang berada pada level meso (menengah). Dua perspektif teoritis mengajukan penjelasan yang sedikit berbeda tentang struktur mobilisasi.

Proses pemingkaiian (*framing*).

Merujuk ke definisi David Snow, proses *framing* diartikan sebagai “upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif.” Dalam banyak kasus gerakan sosial, isu ketidakadilan (*injustice*) merupakan bingkai yang paling sering dipergunakan untuk mendefinisikan kondisi yang dialami dan dihadapi oleh partisipasi gerakan.

Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 1998 Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) didukung oleh berbagai organisasi/ lembaga (WALHI, LBH, BASKARA, KARPI, KPRP, dan lain sebagainya) mengadakan aksi bersama di depan gedung DPRD II Sleman dan ditemui oleh Ketua dan Anggota DPRD II Sleman, Bupati Sleman dan beberapa struktural Kabupaten Sleman.

Aksi berlangsung dengan damai dengan beberapa acara di antaranya acara spiritual dengan membawa air Umbul Wadon dengan kendil, *Happening Art*, pembacaan tuntutan rakyat. Selama aksi berlangsung tidak terjadi kerusuhan dan semua berjalan dengan lancar. Aksi ini dapat dilihat pada dokumen foto tahu 1998 berikut:



Gb. IV.1. KRLM saat melakukan aksi

Inti pernyataan sikap KRLM pada saat aksi adalah menuntut kepada pemerintah Kabupaten Sleman dan Propinsi DIY untuk melakukan **Reformasi Total Pengelolaan Umbul Wadon** Isi dari tuntutan yang perjuangkan oleh KRLM yaitu:

1. Pembatalan Proyek Pengembangan Sistem Pelayanan Air Bersih (P2SPAB) PDAM Tirta Dharma (PDAM Sleman, dengan menerbitkan SK Pembatalan dan pembongkaran atau pemutusan pipa sepanjang 2 km dari Umbul Wadon sebagai prasyarat. Yang dimaksud dengan pembatalan di sini adalah pembatalan proyek yang dibuat tanpa komunikasi dengan masyarakat, dan diganti dengan pelaksanaan proyek yang disepakati bersama.
2. Dibuatnya bak reformasi untuk pengaturan pembagian air. Bak reformasi ini adalah *water meter* yang digunakan untuk mengatur pembagian debit air untuk semua penggunaannya sehingga akan lebih terkontrol.

3. Dibuat AMDAL (Analisa mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL berfungsi untuk pengaturan penggunaan air serta untuk melakukan penjagaan/konservasi agar mata air Umbul Wadon tetap lestari (tidak mati) seperti mata air lainnya di lereng Merapi.

Pembacaan pernyataan dan tuntutan tergambar dari dokumen di bawah:



Gb. IV.2

Pak Hari mewakili KRLM membacakan tuntutan, di samping kanan Bupati Sleman Drs. Arifin Ilyas.

Reformasi total ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam penggunaan air Umbul Wadon sehingga semua pihak dapat melakukan kemitraan dalam penggunaan, pengelolaan, dan pemeliharaan terhadap mata air Umbul Wadon sehingga terjadi kesinambungan (keberlanjutan). Bupati Sleman dan Anggota DPRD Sleman mendengarkan tuntutan rakyat dengan seksama. Dalam pembacaan tuntutan ini diwakili oleh Pak Hari. Tuntutan-tuntutan ini diharapkan dapat segera dipenuhi oleh pemerintah.



Gb.IV.3 Aksi masyarakat di Gedung DPRD Sleman

Foto di atas menunjukkan bahwa aksi kolektif KRLM di gedung DPRD Sleman berlangsung damai dan teratur. Bahkan, dalam aksi KRLM menyuguhkan *Happening art* sebagai upaya untuk semakin menarik pemerintah agar segera mengabulkan tuntutan mereka. *Happening art* yang ditunjukkan berupa drama teaterikal yang menceritakan mengenai penindasan kaum elit kepada rakyat yang dalam hal ini penindasan atas hak sumber daya air Umbul Wadon. Cerita ini diusung untuk lebih dapat membuka pikiran pemerintah bahwa kebijakan yang di ambil mengenai pemanfaatan mata air Umbul Wadon secara penuh tanpa mempedulikan rakyat akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.



Gb. IV.4. Aksi *Happening Art* peserta aksi di depan Gedung DPRD Sleman

Selain *Happening Art* dalam aksinya KRLM juga melakukan upacara ritual yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Upacara ritual yang terlihat pada dokumen di bawah ini menunjukkan sungguh berartinya air Umbul Wadon bagi kehidupan masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun nilai secara spiritual.



Gb. IV.5. Acara Spiritual dengan membawa Air Umbul Wadon dengan Kendi

Hasil dari aksi bersama di Gedung DPRD Sleman adalah adanya negosiasi bersama antara DPRD dan Bupati Sleman dengan Komite Rakyat Lereng Merapi untuk mencari solusi yang terbaik bagi kesejahteraan bersama.

D. Gerakan Masyarakat Tahun 2003-2004

Setelah AMDAL selesai dibuat dan diimplementasikan pada tahun 2000, maka konflik antara Komite Rakyat Lereng Merapi mulai mereda. Meski demikian, dalam interval waktu tersebut sebagian masyarakat sudah menengarai adanya kecurangan air, yang dibuktikan dari aliran untuk irigasi yang semakin mengecil. Akan tetapi, masyarakat belum mempunyai kapasitas untuk menyelesaikannya atau berkonsolidasi untuk bertindak. Melalui rangkaian diskusi terbatas para aktivis dan masyarakat, kecurangan tersebut dimunculkan melalui media massa pada September 2003. Sejak saat itu, isu mengenai konflik Umbul Wadon mulai meningkat lagi.

Konflik Umbul Wadon kembali muncul karena aliran air irigasi masyarakat yang sebelumnya juga disuplai dari Umbul Lanang, mulai September 2003 terhenti, karena Umbul Lanang mulai tidak mengeluarkan air. Praktis irigasi hanya bergantung dari Umbul Wadon yang sudah dieksploitasi untuk berbagai macam keperluan. Selain itu konflik mencuat karena PDAM Sleman tidak mematuhi aturan pembagian air sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam AMDAL. Seperti disebut di atas, jatah 35 persen untuk air minum dibagi untuk tiga perusahaan, yaitu PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, dan PD. Anindya, yaitu perusahaan daerah milik Provinsi DIY yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kaliurang, yang salah satunya menyediakan layanan air bersih. Namun kenyataannya, dari hasil pengukuran yang dilakukan pada Oktober, Desember 2003 dan April 2004, PDAM Sleman telah mengambil

jatah air yang berlebihan, dari yang diijinkan sekitar 80 liter/detik menjadi sekitar 190 liter/detik atau hampir 150 persen lebih banyak dari yang diijinkan. Fenomena tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Basuki sebagai berikut:

“Setelah AMDAL tahun 2000, semua berjalan lancar, akhir 2003 air irigasi berkurang dan setelah dilakukan pengecekan ternyata PDAM Sleman dan PD. Argajasa melakukan kecurangan dengan memasang pipa di luar bak reformasi. Hal ini menyulut emosi warga.”

Wawancara: Pak Basuki, 16 Agustus 2008 jam 13.30 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Sobar :

“Kami benar-benar kecewa ternyata PDAM Sleman tidak mematuhi AMDAL yang telah disepakati bersama. Akhirnya kami melakukan konsolidasi yang didampingi oleh LSM Wana Mandhira ”

Wawancara: Pak Sobar, 20 Agustus 2008 jam 11.00 WIB

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat senantiasa melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan hasil dari kesepakatan gerakan masyarakat tahun 1998. Fenomena tahun gerakan masyarakat tahun 2003 juga memberikan pelajaran bagi penulis bahwa masyarakat mulai cerdas dalam melihat kebijakan pemerintah dan implementasinya serta masyarakat berani dalam melakukan protes untuk memperjuangkan haknya.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan pejabat PDAM Sleman dan PD. Argajasa perihal kecurangan tersebut, dari kedua pihak tersebut mengaku bahwa pipa-pipa tersebut di pasang tidak untuk mengambil jatah air secara berlebih melainkan untuk melakukan pemeliharaan dan pengurusan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Edi dan Pak Yulianto Subagyo sebagai berikut:

“PDAM Sleman memasang pipa *by pass* bukan untuk melakukan kecurangan melainkan untuk melakukan pemeliharaan agar pelayanan terhadap pelanggan tidak terganggu”

*Wawancara: Pak Edi,
30 Agustus 2008 jam 08.05 WIB*

“Argajasa memasang pipa di luar bak reformasi tetap tidak mempengaruhi debit air yang dialirkan, karena lokasi penyaluran air dari Umbul Wadon tidak mengandalkan tenaga gravitasi karena lokasinya lebih tinggi.”

*Wawancara: Pak Yulianto Subagyo,
21 Agustus 2008 jam 09.00 WIB*

Walaupun PDAM melakukan pembelaan tetapi fakta-fakta di lapangan telah memberikan bukti mengenai kecurangan tersebut. Hasil wawancara tersebut menambah bukti bahwa pihak PDAM Sleman dan perusahaan air lainnya tidak mengakui kecurangan yang telah dilakukan dan selalu melakukan pembelaan. Tetapi masyarakat tidak begitu saja percaya karena bukti-bukti di lapangan menunjukkan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan.

Langkah awal sebelum kecurangan PDAM Sleman dimunculkan ke publik adalah dengan melakukan pendidikan kritis bagi para petani, yaitu membekali petani dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pengelolaan air, AMDAL, dan hak-hak petani. Dari proses yang dilakukan ini diharapkan akan terbangun militansi di kantong-kantong petani untuk ikut aktif berjuang mempertahankan hak-haknya. Proses ini berjalan secara kontinyu dari Agustus 2003 – Februari 2004. Pendidikan kritis ini dilakukan oleh LSM Wana Mandhira sebagai LSM yang mendampingi gerakan masyarakat pada tahun 2003.

Kecurangan PDAM secara terbuka disampaikan melalui kampanye di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Angga sebagai Ketua LSM Wana Mandhira:

“aksi protes masyarakat yang kedua tidak lagi melalui demonstrasi melainkan dimunculkan melalui media masa. Sebelum melakukan aksi ini masyarakat dibekali dengan beberapa pengetahuan melalui training ”

Wawancara: Angga, 6 Agustus 2008 jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Sobar sebagai berikut.

“Kami melakukan protes tidak dengan demonstrasi melainkan melalui media masa, yang kami semua berfikir bahwa cara ini lebih efektif”

Wawancara: Pak Sobar, 20 Agustus 2008 jam 11.00 WIB

Model gerakan sosial melalui media ini merupakan strategi adaptif masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak atas sumber daya air. Strategi adaptif masyarakat di sini mempunyai makna bahwa masyarakat dalam melakukan aksi menggunakan model-model yang sesuai dengan waktu dan kondisi pada saat dilaksanakannya gerakan masyarakat agar tuntutan dikabulkan. Perang di media massa antara masyarakat dengan PDAM Sleman dan perusahaan air lainnya dapat dilihat pada lampiran dari laporan penelitian ini.

Pembentukan tim negosiasi yang terdiri atas tujuh orang yang mewakili petani, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan aktivis LSM. Tim negosiasi, yang kemudian disebut Tim tujuh, bertugas untuk mewakili petani dalam mempersiapkan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terkait, maupun menjadi juru bicara untuk kepentingan petani. Tim tujuh juga mengambil peran untuk bisa melokalisir permasalahan sehingga

tetap pada fokus semula, yaitu tentang kecurangan PDAM Sleman. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bagyo sebagai berikut: “Untuk melakukan negosiasi dibentuklah tim tujuh yang berasal dari petani, Pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa dan aktivis LSM” (*Wawancara: Pak Bagyo, 10 Agustus 2008 jam 16.00 WIB*).

Melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim tujuh dengan Pemda Sleman dan PDAM Sleman sepanjang April – Mei 2004 akhirnya membuahkan hasil, walaupun sempat dilakukan perundingan yang sangat alot beberapa kali. Pada tanggal 21-30 Mei 2004, dilakukan pengukuran debit dan pengalokasian air sesuai dengan Amdal, yang diikuti oleh Pemda Sleman, petani, LSM, dan Perusahaan Air Minum. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Umbul Harjo Pak Bejo sebagai berikut: “Hasil dari perundingan tim tujuh akhirnya dilakukan pengukuran ulang debit air” (*Wawancara: Pak Bejo, 9 Agustus 2008 jam 09..00 WIB*).

Dalam pengukuran ulang tersebut juga terkuak ternyata bukan hanya PDAM Sleman yang melakukan kecurangan, tetapi juga PDAM Tirta Marta dan PD. Anindya karena mereka memasang *pipa by pass* yang tidak melalui bak pembagian air. Pada saat itu juga dilakukan pembongkaran pipa oleh masyarakat. Namun memang dari sisi eksploitasi air, PDAM Sleman melakukan kecurangan yang paling besar.

Selain pengalokasian air sesuai dengan AMDAL, disepakati juga oleh para pihak agar ada perbaikan dan peningkatan dalam melakukan konservasi di Kali Kuning. Namun, point yang terakhir ini sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas, walaupun menurut informasi sudah dianggarkan dalam APBD Sleman tahun 2005. []

BAB V

ADVOKASI MASYARAKAT VS PEMERINTAH

A. Pengantar

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses masyarakat dalam melakukan komunikasi dan advokasi dengan pemerintah untuk mengubah kebijakan pemerintah mengenai pembagian air Umbul Wadon secara adil demi kepentingan rakyat. Pasca gerakan masyarakat tahun 1998 dan 2004 masyarakat melakukan negosiasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah, PDAM Sleman, PD. Anindya, PDAM Tirta Marta untuk mengubah kebijakan pemerintah terkait penggunaan air Umbul wadon.

Proses advokasi tahun 1998 hingga berhasil membuat kebijakan berupa dokumen AMDAL berlangsung selama hampir dua tahun. Cukup alot dan berliku tantangan yang dihadapi masyarakat dalam hal ini Komunitas Rakyat Lereng Merapi dalam melakukan advokasi pasca aksi di depan Gedung DPRD Sleman. Banyak kepentingan yang ikut dalam proses komunikasi dan negosiasi, bahkan yang paling ekstrem adalah adanya ancaman, fitnah yang mendera persatuan dan kesatuan masyarakat dalam

memperjuangkan haknya. Ancaman secara psikis dan kekerasan fisik diterima oleh pemimpin dari Komunitas Rakyat Lereng Merapi. Namun kondisi seperti ini tidak membuat Komunitas Rakyat Lereng Merapi merasa takut dan berhenti tetapi justru membuat semakin semangat dalam memperjuangkan haknya. Setelah kurun waktu hampir dua tahun akhirnya proses negosiasi dan komunikasi yang berlangsung alot menghasilkan kebijakan baru yang cukup menggembirakan rakyat yaitu dikabulkannya tuntutan rakyat, dan satu persatu mulai dilaksanakan.

Setelah tuntutan dilaksanakan, masyarakat terus melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaannya hingga ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan PDAM Sleman dan PD. Anindya hingga konflik mencuat dan terjadi aksi protes dari masyarakat yang didampingi oleh LSM Wana Mandhira. Komunikasi dan negosiasi kembali dilakukan antara PDAM Sleman, PD. Anindya, Pemerintah Daerah, LSM Wana Mandhira dengan dibentuk tim tujuh yang berfungsi untuk melakukan perumusan kebijakan baru sebagai solusi. Hasil dari proses negosiasi dan komunikasi ini adalah disepakati AMDAL jilid II.

B. Negosiasi dan Advokasi Tahun 1998

DPRD dan Bupati Kabupaten Sleman mengajak bernegosiasi dan dialog dengan perwakilan Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1998. Dialog dan Negosiasi berlangsung di Aula Bappeda Sleman yang dihadiri berbagai unsur, yaitu Perwakilan Komite Rakyat Lereng Merapi, DPRD Sleman, Bupati Sleman, LSM WALHI, Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, PDAM Sleman, PD. Anindya, dan PDAM Tirta Marta.

Tim Negosiasi dari Komite Rakyat Lereng Merapi (KRLM) mengajukan tuntutan yakni :

1. Pembatalan Proyek Pengembangan Sistem Pelayanan Air Bersih (P2SPAB) PDAM Tirta Dharma (PDAM Sleman) dengan menerbitkan SK Pembatalan dan pembongkaran atau pemutusan pipa sepanjang 2 km dari Umbul Wadon sebagai prasyarat.
2. Reformasi total pengelolaan Umbul Wadon meliputi pembuatan AMDAL. Distribusi Air Umbul Wadon juga harus diatur, yaitu: 20% untuk konservasi/reservasi, 50% untuk DAM Pluyon/ irigasi, 10% untuk konsumsi masyarakat lereng Merapi, 5% untuk PD Anindya/ Argajasa, dan 15% PDAM Tirta Dharma/PDAM Sleman, dan PDAM Tirta Marta. Secara Teknik pengaturan air tersebut harus melewati Bak. Maka harus dibangun Bak Reformasi dengan dilengkapi Water meter. Selain itu juga harus dilakukan reformasi terhadap manajemen dan Kinerja.
3. Reboisasi di Lereng Merapi

Perwakilan dari Komite Rakyat Lereng Merapi adalah Sigit Hidayat Nuri, Y Bambang Sugeng, Mulyono, Syahlan Hasbi, S.Eddy Harryanto. Mereka menyuarakan tuntutan rakyat. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa dalam tempo tiga puluh hari setelah pertemuan di aula Bappeda, maka tuntutan Komite Rakyat Lereng Merapi akan dipenuhi oleh Bupati dan DPRD Sleman. Hal ini diungkapkan oleh Pak Hari dan Pak Bambang sebagai berikut: “Saya mewakili KRLM untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pemerintah” (*Wawancara: Pak Bambang, 15 Agustus 2008 jam 08.00 WIB*). “Negosiasi yang dilakukan pasca aksi adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Saya mewakili KRLM untuk memperjuangkan tuntutan kami” (*Wawancara: Pak Hari, 27 Agustus 2008 jam 17.00 WIB*).

Strategi-strategi gerakan yang sering diterapkan oleh komunitas lokal di Indonesia untuk mencapai tujuan dibagi menjadi: strategi organisasi, strategi lobi, demonstrasi, strategi pendudukan lahan, dan strategi kekerasan (Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria*, Padang: Andalas University Press, 2006: 42). Pada umumnya penduduk/komunitas mengkombinasikan strategi-strategi di atas dan pada dasarnya penerapan strategi itu bertahap. Pada gerakan masyarakat Umbul Wadon menerapkan strategi aksi secara kolektif dengan berdemonstrasi menyampaikan tuntutan, yang didahului dengan pembentukan organisasi untuk menguatkan konsolidasi di antara masyarakat. Setelah dilakukan aksi maka langkah yang dilanjutkan adalah advokasi kepada pemerintah dengan negosiasi dan komunikasi untuk merumuskan kebijakan baru.

Pada hari Kamis, 20 Agustus 1998 dilakukan pembongkaran pipa tahap awal dengan dimeriahkan pertunjukan tarian tradisional *Jathilan* di Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo. Pembongkaran pipa merupakan pelaksanaan awal dari tuntutan rakyat atas kebijakan penggunaan air Umbul Wadon yang tidak memihak kepada rakyat. Hari ini merupakan hari yang sangat menggembirakan rakyat sehingga pembongkaran ini dimeriahkan dengan kesenian *Jathilan*. Pembongkaran pipa ini sebagai dasar untuk dilakukan kesepakatan baru mengenai penggunaan air Umbul Wadon. Pembongkaran pipa ini bukan berarti PDAM Sleman lantas tidak memanfaatkan air Umbul Wadon, melainkan pelaksanaan proyek pemanfaatan air Umbul Wadon setelah disepakati bersama dengan semua pihak.

Pada tanggal 3 September 1998 KRLM membongkar bak pelepasan tekanan air dan reservoir air karena SK pembatalan proyek dan pembongkaran pipa tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kejadian ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah komitmen dengan apa yang telah disepakati. Pemerintah ingkar dan tidak melanjutkan pembongkaran pipa PDAM. Reaksi atas kondisi

ini masyarakat membongkar bak pelepasan tekanan air dan reservoir dengan harapan pemerintah melanjutkan pembongkaran pipa. Selain melakukan aksi ini, KRLM juga mengirimkan surat langsung untuk menegur pemerintah atas sikap yang tidak komitmen.

Pada tanggal 7 September 1998 Bupati menerbitkan SK Nomor 220/nKep.KDG/1998 tentang pembatalan proyek yang diikuti dengan pembongkaran pipa. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Pak Bagyo:

“Tanggal 20 Agustus kami warga melakukan pembongkaran pipa dengan dimeriahkan pertunjukkan jathilan. Karena SK pembatalan proyek tidak kunjung kami terima maka kami melakukan pembongkaran bak pelepasan tekanan air sebagai wujud protes kami. Baru tanggal 7 september 1998 bupati menerbitkan SK pembatalan proyek dan pembongkaran pipa”

Wawancara: Pak Bagyo, 10 Agustus 2008 jam 16.00 WIB

Penulis melihat bahwa dalam melakukan advokasi kepada pemerintah tidak setengah-setengah dan langsung puas dengan janji pemerintah. Pada kasus Umbul Wadon, pemerintah tidak komitmen dengan apa yang sudah disepakati bersama sehingga masyarakat kembali melakukan aksi dan mengirimkan surat untuk menegur pemerintah, dan aksi ini berhasil sehingga diterbitkan SK pembongkaran pipa.

Pada tanggal 14 September 1998 KRLM mengirim surat kepada Bupati Sleman, perihal tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tanggal 13 Agustus 1998 yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni SK dan pelaksanaan reboisasi, reformasi total pengelolaan Umbul Wadon, serta pembentukan tim penyusunan AMDAL. Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur DIY, dan Lembaga Bantuan

Hukum (LBH). Pada hari Jum'at, 18 September 1998 diterbitkan SK Reboisasi.

Pada tahun 1999 Dinas Pertambangan (sekarang Dinas Pengairan, Pertambangan dan Pengendalian Bencana Alam/ PPPBA) menunjuk PT Sinca Mataram untuk menyusun AMDAL. Pada penyusunan AMDAL beberapa kali dilakukan diskusi antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Tim KRLM dan Tim AMDAL. Perbedaan pun sering muncul baik menyangkut akurasi alat, metode, waktu pengukuran, sosial, budaya, ekonomi. Tetapi yang paling krusial adalah mengenai tuntutan KRLM yang tidak dicantumkan pada AMDAL, yaitu pembagian air dan Kuota air pengguna. Hal ini seperti yang diungkapkan Pak Basuki:

“Karena sudah satu bulan tuntutan kami tidak kunjung dipenuhi, KRLM mengirim surat kepada bupati dengan tembusan dari Mendagri, Pemprop DIY dan LBH, dan sebagai hasilnya bupati mengintruksi Dinas PPPBA untuk menyusun AMDAL dan ditunjuklah PT Sinca Mataram”

Wawancara: Pak Basuki, 16 Agustus 2008, jam 13.30 WIB

AMDAL kemudian disusun oleh tim yang sudah disepakati yang isi dari AMDAL adalah kesepakatan bersama antara Komunitas Rakyat Lereng Merapi, Pemerintah Daerah, PDAM Sleman, PD.Anindya dan PDAM Tirta Marta. Ketika Tim AMDAL mempresentasikan hasil AMDAL di BAPEDALDA DIY yang dihadiri oleh pimpinan dan staf BAPEDALDA DIY, Pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Tim KRLM masih terjadi perbedaan pendapat. Tuntutan KRLM masih tidak tercantum dalam AMDAL padahal tuntutan KRLM sungguh-sungguh aspirasi masyarakat yang mestinya menjadi bagian pada RKL (Rencana Kelola Lingkungan). Tim KRLM berpendirian teguh, bila tuntutan KRLM tidak dicantumkan pada AMDAL, maka KRLM tidak ikut

bertanggungjawab atas hasil AMDAL dan pelaksanaan/ kelanjutan proyek. Ketua BAPEDALDA DIY men-*scorsing* selama 1 jam. Saat *scorsing* dilakukan *lobby*, dari hasil *lobby* ditemukan *win-win solution*, yakni tuntutan KRLM dipenuhi namun pembagian air menjadi: 50% Air untuk irigasi, 15% untuk Konservasi/reservasi, dan 35% untuk Masyarakat Lereng Merapi (tidak komersial) dan untuk eksploitasi PDAM Sleman, PDAM Tirtamarta, PD Argajasa/Anindya. Hal ini seperti yang diungkapkan Pak Hari sebagai berikut:

“Saya mewakili KRLM untuk mendengarkan keputusan AMDAL, tetapi kami sempat kecewa karena tuntutan KRLM tidak tercantum dalam AMDAL, akhirnya saya dan teman-teman teguh pendirian dengan komitmen kalau tuntutan kami tidak dimasukkan dalam AMDAL maka kami tidak akan bertanggungjawab atas proyek. Kemudian dilakuakn *scorsing* dan akhirnya tuntutan kami dipenuhi dengan mengubah porsi pembagian air”

Wawancara: Pak Hari, 27 Agustus 2008 jam 17.00 WIB

AMDAL selesai tahun 2000, maka dibangun bak reformasi yang dilengkapi dengan *water meter*. Bak reformasi ini berfungsi untuk mengontrol penggunaan air oleh berbagai pihak sehingga dimungkinkan tidak akan ada kecurangan. Bak reformasi ini dibangun tepat di depan mata air Umbul Wadon, dan setiap pihak berhak memiliki kunci pembuka bak reformasi sehingga dapat saling mengontrol penggunaan air Umbul Wadon.



Gb. IV.6. Bak Reformasi



Gb. IV.7. Pipa-Pipa dan *Water Meter*

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitas kepada masyarakat lereng Gunung Merapi berupa pemasangan pipa-pipa penyaluran air bersih yang disalurkan langsung pada permukiman penduduk.

Dalam membela kaum papa masyarakat desa, KRLM bukan hanya menghadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Propinsi DIY tetapi juga didera perpecahan antara aktor gerakan sosial, fitnah, teror yang sempat melemahkan dan nyaris melumpuhkan gerakan moral KRLM. Ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana ataupun ingin mengambil keuntungan dari situasi yang tidak menentu bahkan premanpun dilibatkan untuk menghadang gerakan KRLM. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Hari dan Pak Bambang sebagai berikut:

“Ancaman-ancaman yang kami terima sungguh mengerikan dan kami tidak menyangka akan seperti itu. Mulai ancaman akan dibunuh, diteror. Sampai istri saya ungsikan di rumah saudara saya. Kami hampir melemah, tetapi di antara kami saling menguatkan. Selain itu kami difitnah sehingga terjadi perpecahan kelompok. Fitnahnya adalah ada sebagian dari kami yang menerima uang dari pemerintah.”

Wawancara: Pak Hari, 27 Agustus 2008 jam 17.00 WIB

“Berat badan saya sampai turun 4 kilo, tekanan, ancaman dan teror dari preman terus saja kami terima, kami bersyukur tidak sampai ada korban karena dapat diselesaikan dengan cara negosiasi”

Wawancara: Pak Bambang 30 Agustus 2008 jam 09.09 WIB

Setiap perjuangan dalam menegakkan keadilan sudah dipastikan banyak halangan dan rintangan yang menghadang, seperti yang dihadapi oleh Komunitas Rakyat Lereng Merapi dalam melakukan perjuangan. Dalam sebuah aksi gerakan social banyak kepentingan yang saling berlawanan sehingga ancaman dalam bentuk psikis maupun fisik diterima oleh para aktor gerakan masyarakat. Ancaman dan terror dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mematahkan tekad dari aktor gerakan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.

Peluang dari KRLM dalam melakukan aksi adalah banyaknya dukungan masyarakat, karena KRLM merupakan organisasi bentukan masyarakat untuk melakukan advokasi kepada pemerintah. Selain itu, situasi politik yaitu transisi dari masa Orde Baru yang tertutup ke masa Reformasi yang serba terbuka memudahkan arah gerak KRLM. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Hari berikut: “Peluang kami dalam melakukan gerakan adalah adanya satu tujuan sehingga mobilisasi massa terjadi secara alami selain itu transisi masa Orde Baru ke masa reformasi” (*Wawancara: Pak Hari, 27 agustus 2008 jam 17.00 WIB*).

Sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai satu tujuan untuk menegakkan keadilan demi kepentingan bersama menjadi kekuatan besar untuk melakukan sebuah gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat Umbul Wadon berhasil mengubah kebijakan pemerintah karena adanya kesatuan tujuan dan tekad dari rakyat untuk menegakkan keadilan. Selain satu hal tersebut gerakan masyarakat sekitar Umbul Wadon bertepatan dengan peristiwa besar Indonesia yaitu reformasi dimana rakyat bebas menyuarakan haknya untuk mencapai keadilan.

C. Negosiasi dan Advokasi Tahun 2003-2004

Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2003/2004 PDAM Tirta Dharma (PDAM Sleman) diketahui melakukan kecurangan dengan membangun instalasi pipa *by pass* yang tidak melewati Bak Reformasi ataupun *water meter*. Mereka berdalih bahwa pipa-pipa tersebut dipasang untuk pengurusan dan pemeliharaan bukan untuk mengambil jatah lebih dari yang ditentukan. Hal ini diketahui setelah masyarakat merasakan kekurangan air lalu dilakukan pengamatan dan penyelidikan serta pengukuran. Hal ini seperti diungkapkan Lurah Umbulharjo, Pak Bejo Mulyono:

“Setelah AMDAL selesai disusun tahun 2000, maka bak reformasi segera dibangun yang dilengkapi dengan water meter, namun pada perjalanannya karena monitoring yang tidak maksimal PDAM Sleman melakukan kecurangan”

*Wawancara: Pak Bejo Mulyono,
9 Agustus 2008 jam 09.39 WIB*

Adanya kecurangan ini, maka masyarakat kembali melakukan aksi untuk memperjuangkan hak atas sumber daya air Umbul Wadon. Berbeda dengan aksi tahun 1998, aksi pada tahun 2003-2004 tidak lagi dengan berdemonstrasi ke kantor DPRD tetapi menyuarakan aspirasinya langsung melalui media massa. Cara ini dinilai lebih efektif. Setelah dilakukan aksi ini maka konflik kembali mencuat dan kembali dilakukan negosiasi dan komunikasi untuk mencari solusi.

Adapun tahap-tahap advokasi dan implementasi kebijakan tahun 2003- 2004 sebagai berikut:

1. Pendidikan kritis bagi para petani.

Yaitu, membekali petani dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pengelolaan air, Amdal, dan hak-hak petani. Dari proses yang dilakukan ini diharapkan akan terbangun militansi di kantong-kantong petani untuk ikut aktif berjuang mempertahankan hak-haknya. Proses ini berjalan secara kontinyu dari Agustus 2003 – Februari 2004. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Angga: “sebelum melakukan aksi di media massa rakyat dilakukan pendidikan kritis untuk membekali militansinya” (*Wawancara: Angga, 6 Agustus 2008 jam 16.00 WIB*).

Pendidikan kritis bagi masyarakat sebelum melakukan sebuah gerakan sangat diperlukan untuk membentuk karakter militan petani dan juga untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai

sehingga dalam melakukan gerakan apabila ada ancaman maupun gangguan tetap pada pendirian yang teguh dan tidak mudah goyah.

2. Kampanye di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004.

Terkuaknya kecurangan tersebut menyebabkan Pemda dan PDAM Sleman kalangkabut dan menyebabkan informasi yang beredar menjadi sangat kompleks dan apabila dibiarkan akan menimbulkan konflik kekerasan.

3. Membentuk tim negosiasi yang terdiri atas 7 orang yang mewakili petani, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan aktivis LSM. Tim negosiasi, yang kemudian disebut Tim 7, bertugas untuk mewakili petani dalam mempersiapkan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terkait, maupun menjadi juru bicara untuk kepentingan petani. Tim 7 juga mengambil peran untuk bisa melokalisir permasalahan sehingga tetap pada fokus semula, yaitu tentang kecurangan PDAM Sleman.
4. Melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim 7 dengan Pemda Sleman dan PDAM Sleman sepanjang April – Mei 2004 akhirnya membuahkan hasil, walaupun sempat dilakukan perundingan yang sangat alot beberapa kali. Pada 21-30 Mei 2004, dilakukan pengukuran debit dan pengalokasian air sesuai dengan Amdal, yang diikuti oleh Pemda Sleman, petani, LSM, dan Perusahaan Air Minum. Dalam pengukuran ulang tersebut juga terkuak ternyata bukan hanya PDAM Sleman yang melakukan kecurangan, tetapi juga PDAM Tirta Marta dan PD. Anindya karena mereka memasang *pipa by pass* yang tidak melalui bak pembagian air. Pada saat itu juga dilakukan

pembongkaran pipa oleh masyarakat. Namun memang dari sisi eksploitasi air, PDAM Sleman melakukan kecurangan yang paling besar. Selain pengalokasian air sesuai dengan Amdal, disepakati juga oleh para pihak agar ada perbaikan dan peningkatan dalam melakukan konservasi di Kali Kuning. Namun, poin yang terakhir ini sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas, walaupun menurut informasi sudah dianggarkan dalam APBD Sleman tahun 2005.

Ancaman yang diperoleh adalah adanya provokasi konflik antara masyarakat hulu dan hilir. Di samping konflik vertikal-struktural tersebut, masih berkembang pula konflik antara masyarakat petani dan PDAM, yang kemudian ditransformasikan oleh “oknum-oknum” PDAM Sleman menjadi konflik horisontal antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir (konsumen PDAM Sleman). Pelaksanaan Amdal masih terus dipertanyakan oleh para konsumen PDAM karena dinilai sepihak dan merugikan mereka.

Konflik horisontal tersebut dibuat untuk mengalihkan kelemahan dari pihak PDAM Sleman, yaitu masalah kecurangan air, menjadi konflik perebutan air antara petani dan pelanggan PDAM Sleman. Dengan memanipulasi konflik, maka substansi advokasi berusaha dipecah menjadi sebuah provokasi dan akhirnya akan melepaskan tanggung jawab hukum dari para pejabat PDAM Sleman dan Pemda Sleman.

Namun provokasi ini mampu dikelola melalui komunikasi antara masyarakat hulu dan hilir dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, maupun melalui pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait. Kedewasaan dari masyarakat, baik petani dan pelanggan, harus diacungi jempol, karena mereka menyadari kepentingan yang lebih besar.

Dalam mengeliminir provokasi tersebut, peran media massa menjadi sangat penting untuk menjelaskan posisi petani dan pelanggan PDAM Sleman, ketika saluran komunikasi langsung belum memungkinkan dilakukan. Dialog melalui radio dipergunakan sebagai media untuk memberikan penjelasan objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi di Umbul Wadon, sehingga distorsi dan manipulasi informasi dapat ditekan.

Inisiatif melakukan komunikasi yang dilakukan oleh Tim 7 dilanjutkan secara langsung dan konkret dalam pertemuan dengan perwakilan dari Forum Pelanggan PDAM Sleman. Dalam pertemuan langsung, baik di lapangan maupun dalam pertemuan di rapat-rapat, dihasilkan jaminan dari para pihak untuk tidak terpancing pada provokasi dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan substansinya.

Peluang yang didapatkan oleh masyarakat bahwa aksi protes melalui media massa akan efektif karena langsung didengarkan oleh pejabat yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, yaitu LSM, LBH, dan pemerintah desa. []

BAB VI

PENUTUP

Kecenderungan pengelola lingkungan merumuskan persoalan lingkungan secara biologis dan teknis belaka, kurang berhasil dalam menghadapi aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan karena perhatian dalam persoalan tersebut masih sangat kurang, termasuk salah satunya pengelolaan sumber daya air. Sebagai seorang perencana dan pengelola sumber daya air dituntut untuk dapat memahami paradigma air sebagai “*physical unit*” meliputi proses sumber daya alam dan lingkungan serta sebagai “*social unit*” meliputi perilaku manusia dan berbagai faktor sosial yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaannya.

Keberadaan Umbul Wadon tidak terlepas dari pengaruh kehidupan masyarakat lokal beserta kebiasaan hidup dan sistem kepercayaan, pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam serta kepercayaan masyarakat lokal (*local wisdom*) berupa kearifan hidup yang menekankan pada penghormatan terhadap alam dan lingkungan merupakan nilai positif dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan tertuang dalam ritual adat dandan kali. Masyarakat percaya adanya kekuatan lain yang perlu dihormati, apabila manusia

berbuat baik pada alam maka akan memperoleh imbalan yang baik pula.

Pengelolaan mata air Umbul Wadon melibatkan beberapa aktor yakni pemerintah, masyarakat, PDAM Sleman, serta kelompok usaha lainnya menggiring pada terjalinnya pola-pola hubungan yang saling mempengaruhi.

Adanya sifat ketergantungan masing-masing *stakeholders* pada pasokan air dari Umbul Wadon menuntut terjadinya jalinan kerjasama dari masing-masing aktor baik dalam kegiatan pemanfaatan maupun konservasi hutan dan air. Jalinan kerjasama itu terjalin akibat adanya 'ketidakpuasan' masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan yang berbuah aksi gerakan masyarakat yang mampu mengubah kebijakan pemanfaatan air Umbul Wadon. Dari aksi tersebut, maka dihasilkan AMDAL untuk mengatur pemanfaatan air Umbul Wadon. Sampai pada saat ini hal yang terkait dengan Umbul Wadon adalah pemanfaatan mata air Umbul Wadon yang terus menerus tanpa diberengi dengan pemeliharaan yang maksimal.

Kemitraan terjalin dalam pembuatan dan penetapan dokumen AMDAL Umbul Wadon dengan menetapkan beberapa kegiatan operasional pembangunan *broncaptering* dan pemasangan *watermeter* sebagai langkah tindak lanjut terhadap resolusi konflik pembagian debit air. Pembuatan kebijakan AMDAL melibatkan peran tim ahli (PT Sinca Mataram) dan merupakan hasil negosiasi dengan masyarakat untuk menghasilkan suatu kesepakatan mengenai system pengelolaan yang akan diterapkan di Umbul Wadon.

Kemitraan multipihak terjalin dalam pembangunan instalasi pipa air bersih dan saluran irigasi, *broncaptering* dan pemasangan *watermeter* serta pembagian debit air sesuai ketentuan AMDAL, pendanaan kegiatan lebih dibebankan pada pemerintah dan kelompok usaha, sedangkan masyarakat memberi kontribusi pada

penyediaan tenaga kerja. Sedangkan dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan cenderung dilakukan masing-masing pihak secara mandiri, khusus OPAB dan OPA masyarakat memperoleh dana kompensasi dari kelompok usaha (PDAM, lapangan golf, hotel dan penginapan, peternakan). Di samping itu juga terjalin kerjasama antara Pemda Sleman dan Kota Yogyakarta dengan pihak (PDAM Tirta Dharma dan Tirta Marta) dalam upaya pemenuhan dan pendistribusian air bersih pada masyarakat hilir, selain merupakan PAD bagi pemda setempat melalui pembayaran Pajak Air Bawah Tanah (ABT) pihak PDAM.

Terjadinya mal-administrasi pasca penerapan AMDAL (tahun 2000-2004) dapat diidentifikasi masyarakat dan LSM setempat. Pengambilan debit air minum yang melebihi ketentuan mengakibatkan jumlah pasokan pada masyarakat (terutama pasokan air irigasi untuk petani) menjadi berkurang. Di samping tidak berfungsinya Kantor pengendali Dampak Lingkungan (KPDL) sebagai pelaksana control dan monitoring terhadap pelaksanaan AMDAL. Langkah-langkah evaluasi kebijakan dilakukan sebagai hasil tindak lanjut dari proses monitoring melalui upaya pengelolaan *water meter* (berupa pengukuran ulang) dan pengembalian debit sesuai AMDAL difasilitasi oleh Dinas P3BA Sleman. []

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Dr, 2006, *Sosiologi Konflik Agraria (protes-protes agraria dalam masyarakat Indonesia kontemporer)*, Andalas University Press, Padang.
- Agustina, Fitria, N.Kusuma, 2004, *Gelombang Perlawanan Rakyat (Kasus-kasus gerakan social di Indonesia)*, Insist Press, Yogyakarta.
- Azhar, Ipong S, 1999, *Radikalisme Petani Masa Orde Baru (Kasus Sengketa Jenggawah)*, PT Tarawang, Yogyakarta.
- Budiman, Arief, Olle Tornquist, 2001, *Aktor Demokrasi (catatan tentang gerakan perlawanan di Indonesia)*, PT Sembrani Aksara Nusantara, Indonesia.
- Dokumen Pendampingan Masyarakat LSM Wana Mandhira Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, 2007, *Mengubah Kebijakan Publik*, Insist Press, Yogyakarta.
- Fauzi, Noor, 2005, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta.

- Hartanto, 2004, *Membangun Kolaborasi Hulu-hilir*. Pelajaran dari Umbul Wadon (www.google.com).
- Huraerah, Abu dan Purwanto, 2006, *Dinamika Kelompok*, Refika Aditama, Bandung.
- Landsberger, Henry A, YU.G.Alexandrov, 1984, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 1992, *Metodologi Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Lofland, John, 2003, *Protes*, Insist Press, Yogyakarta.
- Mitchell, Bruce, B.Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2003, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mirsel, Robert, 2004, *Teori Pergerakan Sosial*, Insist Press, Yogyakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 2002, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho, Heru, 2002, *Gelombang Demokrasi Dunia (Gerakan Sosial dan Perubahan Politik)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Patton 1987 dalam Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Profil Desa Umbulharjo tahun 2007
- Salim, Agus, Drs, MS, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif)*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Silaen, Victor, 2006, *Gerakan Sosial Baru (Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir)*, IRE Press, Yogyakarta.

Suharko, 2006, *Gerakan Sosial*, Averrroes Press, Malang.

Wahyudi, Dr, 2005, Formasi dan struktur gerakan petani (studi kasus reclaiming/penjarahan atas tanah PTPN XII (Persero Kalibakar Malang Selatan), UMM Press, Malang.

Winarno, Budi, 2002., *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta.

Yin, Robert K, Prof, Dr. *Studi Kasus Desain dan Metode*, 2006, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Internet:

http://www.forplid.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1, down load 13 juli 2008. 05.57

http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?row=4&tp=artikel&ktg=airminum&kd_lnk=&kode=62, down load tanggal, 13 juli 2008. 06.03

TENTANG PENULIS

Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A. adalah Dosen Prodi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga. Lahir di Sleman, 2 Mei 1985. Menempuh pendidikan S-1 Ilmu Sosiatri di UGM tahun 2003-2007, S-2 Sosiologi (2007-2009) di universitas yang sama, serta mengantongi gelar doktor tahun 2014-2019 dari pendidikan S-3 Ilmu Geografi UGM.

Beberapa jabatan profesional yang pernah atau sedang ia jabat yakni; Dosen PNS Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 2014-Sekarang, Dosen LB Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga (2014-2015), Tim Ahli Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga.(2012-sekarang), Staff Administrasi Indoedu4all kerja sama PLD UIN Sunan Kalijaga dengan 5 Universitas di Indonesia dan 3 Universitas di Eropa (2016-sekarang), Tim Penjaminan Mutu Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga (2018-sekarang), Tim Tracer Study Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga (2016-sekarang), Wakil Ketua LKP3A PW Fatayat

NU DIY (2018-sekarang), dan anggota SYLFF Tokyo Foundation, Jepang (2007-sekarang).

Menulis disertasi berjudul “Resiliensi Penyandang Paraplegia Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bantul dibiayai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti)”. Beberapa penelitian lain yang juga didanai diantaranya yaitu: “*Digital Inclusion: Grand Design Pengembangan e-inclusion untuk Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY dan Sulawesi Tenggara*” oleh Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga (2019), serta “*PinKeCi: An Investigation Into Perception of People with Disabilities and Stakeholders to Promote and Develop Disability Inclusive Community in DIY and Sulawesi Tenggara*” (2018) dan “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di UIN Sunan Kalijaga*” (2017) masih oleh lembaga yang sama, dan masih banyak lagi, serta ada juga satu-dua penelitian dengan dana mandiri.

Penulis aktif mempublikasikan karyanya melalui buku dan jurnal terakreditasi. Diantaranya yakni: *Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga* (CV Mahata, 2020), “*Is Online Learning Accessible During COVID-19 Pandemic? Voices and Experiences of Students with Disabilities*” (Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam [Sinta 2], 2020), “*Persepsi Penyandang Disabilitas dan Stakeholder untuk Mempromosikan dan Mengembangkan Komunitas Inklusif di DIY dan Asia Tenggara*” (Jurnal Sosiologi Reflektif [Sinta 3], 2019), “*Empowerment of Undergraduate Deaf Students and ‘Sahabat Inklusi’ in Sign Language Training for Support Teachers in Inclusive Schools in Yogyakarta*” (University-Community Engagement [Sinta 3], 2018), “*Model Pendidikan Karakter Komunitas Belajar Qaryah Tayyibah*” (Indonesian Journal of Educational Research [Sinta 2], 2017), dan masih terdapat publikasi lainnya yang diterbitkan hampir setiap tahun sejak 2013.

Di samping mengajar, aktif menulis dan melakukan penelitian, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan mengikuti berbagai pelatihan. Untuk berkomunikasi dengan penulis, pembaca dapat menghubungi nomor 085325346638 (handphone) atau melalui email: astri.hanjarwati@uin-suka.ac.id.

